STRATEGI REKRUTMEN CALEG PEREMPUAN PADA PEMILU 2019

STUDI KASUS DEWAN PIMPINAN CABANG

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN GRESIK

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
SarjanhIlmu Sosial (S. Sos) dalam Bidang Ilmu Politik

Oleh :

MUKAUKABAH ALWADLO

NIM : I71215021

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

2019

PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama	: Mukaukabah Alwadlo
NIM	: I71215021
Progam Studi	: Ilmu Politik
Judul Skripsi	: Strategi Rekrutmen Caleg Perempuan pada Pemilu 2019 Studi Kasus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Gresik.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1) Skripsi ini tidak pernah di kumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2) Skrispi ini adalah benar- benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas orang lain.
3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat di buktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 15 Januari 2019

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL

651EAAFF440459398

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Mukaukabah Alwadlo

NIM: I71215021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bmbingan, arahan, dan korelasi terhadap penulisan skripsi yang di tulis oleh:

Nama : MUKAUKABAH ALWADLO

NIM : I71215021

Program Studi : Ilmu Politik

Yang berjudul "**Strategi Rekrutmen Caleg Perempuan pada Pemilu 2019 Studi Kasus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Gresik**", saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah di perbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana S1 dalam bidang ilmu politik.

Surabaya, 15 Januari 2019

Pembimbing

Dr. Andi Suwarko, S.Ag, M.Si

NIP 19741102003121004

PENGESAHAN

Skripsi oleh Mukaukabah Alwadlo dengan judul "Strategi Rekrutmen Caleg Perempuan pada Pemilu 2019 Studi Kasus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Gresik" telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 22 Januari 2019.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I

Dr. Andi Suwarko, S.Ag, M.Si
NIP. 19741102003121004

Penguji II

Laili Bariroh, M.Si
NIP. 197711032009122002

Penguji III

Muchammad Ismail, S.Sos, MA
NIP. 198005032009121003

Penguji IV

Noor Rohman, MA
NIP. 198510192015031001

Surabaya, 22 Januari 2019

Mengesahkan

Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan

Prof. Akh Muzzaki, M.Ag, Grad.Dip.SEA,M.Phil,Ph.D
NIP. 197402091998031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUKAUKABAH ALWADLO
NIM : I71215021
Fakultas/Jurusan : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK/ ILMU POLITIK
E-mail address : alwabubah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

STRATEGI REKRUTMEN CALEG PEREMPUAN PADA PEMILU 2019 STUDI KASUS DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN GRESIK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Februari 2019

Penulis

MUKAUKABAH ALWADLO

ABSTRAK

Mukaukabah Alwadlo, 2019 Strategi Rekrutmen Caleg Perempuan pada Pemilu 2019 Studi Kasus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Gresik. "Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya."

Penelitian ini mengkaji Strategi Rekrutmen Caleg Perempuan pada Pemilu 2019 Studi Kasus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Gresik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi rekrutmen caleg perempuan di DPC PPP Gresik pada pemilu 2019 dan mengetahui faktorfaktor apa saja yang menjadi penghambat dalam rekrutmen caleg perempuan di DPC PPP Gresik.

Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data mengunakan teknik analisa kualitatif versi Miles dan Huberman meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Studi ini di lakukan di Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gresik. Teori yang di gunakan dalam penelitian ini antara lain: teori rekrutmen politik, Teori Representasi Perempuan dan teori strategi politik.

Temuan penelitian ini meliputi: Strategi rekrutmen caleg yang dilakukan PPP Gresik adalah membentuk Lajnah Pemenangan Pemilu (LP2), sosialisasi pendaftaran caleg, penentuan nomor urut dan dapil caleg pembekalan caleg, forum konsultasi pemenangan caleg, bantuan alat peraga kampanye, penyediaan saksi per TPS, evaluasi progress report caleg. Kendala yang dihadapi caleg perempuan dikategori menjadi dua yakni hambatan internal antara lain: minimnya minat perempuan untuk mencalonkan diri, minimnya pengetahuan dan keterampilan berpolitik, kurangnya dana kampanye, minimnya jaringan social dan keterbatasan waktu kampanye dan hambatan eksternal antara lain Pandangan masyarakat terhadap caleg perempuan masih kurang baik atau masih meremehkan adanya pemimpin perempuan, Caleg pesaing lebih memiliki jejaringan social lebih luas, dan Caleg pesaing memiliki dana kampanye lebih besar.

Kata Kunci : Strategi Politik, Rekrutmen Politik, Partai Persatuan Pembangunan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

Mukaukabah Alwadlo, 2019 Strategy for Recruitment of Female Candidates in the 2019 Election Case Study of Branch Board (DPC) Partai Persatuan Pembangunan Gresik "Thesis Political Science Study Program Faculty of Social and Political Sciences UIN Sunan Ampel Surabaya.

This study is reciting. Strategy for Recruitment of Female Candidates in the 2019 Election Case Study of the Branch Board of the Gresik United Development Party. The purpose of this study is to find out how the strategy of recruiting female candidates in the PPP Gresik DPC in the 2019 election and knowing what factors are the obstacles in the recruitment of female candidates in the PPP Gresik DPC.

This study uses a qualitative approach, with methods of collecting data through in-depth interviews, and documentation. Data analysis using qualitative analysis techniques of the Miles and Huberman versions include data collection, data reduction, data presentation, conclusion drawing or verification. This study was conducted at the Branch Board of the United Development District of Gresik Regency. The theories used in this study include: political recruitment theory, political strategy theory and women's representation theory.

The findings of this researcher include: The strategy of recruiting legislative candidates carried out by PPP Gresik is to establish the election winners, socialize the registration of candidates, determine the serial number and electoral district candidates. Whereas the strategy of winning candidates is categorized into two, namely party institutional strategy covering each candidate who needs consultation or enlightenment about political PPP Gresik DPC is ready at any time to help the legislative candidates and the candidates' personal strategies for each candidate has different strategies for example door to door direct communication with the surrounding community. Second, the constraints faced by female candidates are categorized into two, namely internal barriers, among others: lack of political knowledge or political skills and external barriers, among others, competing candidates have broader and deeper political social networks.

Keyword : Political Strategy, Political Recruitmen, Partai Persatuan Pembangunan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI.....ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....iii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iv

PERSETUJUAN PUBLIKASI v

ABSTRAK vi

DAFTAR ISI.....viii

DAFTAR TABEL.....xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah.....11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 12
E. Definisi Konseptual 12
F. Kajian Pustaka 15

BAB II : KAJIAN TEORITIK

A. Teori Rekrutmen Politik 20
B. Teori Representasi Perempuan 24
C. Teori Strategi Politik.....26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 38
C. Pemilihan Informan dan Objek Penelitian.....38
D. Tahap- Tahap Penelitian 40
E. Teknik Pengumpulan Data.....41
F. Teknik Analisa Data 43
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....44
H. Sistematika Pembahasan.....45

BAB IV : DESKRIPSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN GRESIK

A. DESKRIPSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN GRESIK...47
1. Sejarah Partai Persatuan Pembangunan 47
2. Platform Partai Persatuan Pembangunan 54
3. Sejarah Perkembangan Partai Persatuan Pembangunan 58
4. Program DPC Partai Persatuan Pembangunan Gresik.....59
5. Komposisi Pengurus DPC Partai Persatuan Pembangunan Gresik.....63
6. Partai Persatuan Pembangunan dalam Konstalasi Politik Gresik.....66

B. STRATEGI REKRUTMEN CALEG PEREMPUAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN.....68
1. Membentuk Laznah Pemenangan Pemilu (LP2).....69
2. Sosialisasi Pendaftaran Caleg.....70
3. Penentuan Nomer Urut dan Dapil Caleg.....79
4. Pembekalan Caleg 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Forum konsultasi Caleg 86
6. Bantuan Alat peraga Kampanye 87
7. Penyediaan saksi per TPS 88
8. Evaluasi Progres Report Caleg 90

C. FAKTOR FAKTOR PENGAMBAT REKRUTMEN CALEG PEREMPUAN 92
1. Faktor Internal 92
2. Faktor Ekternal 95

BAB V : PENUTUP

A. KESIMPULAN 99
B. SARAN 100

DAFTAR PUSTAKA 102

LAMPIRAN- LAMPIRAN

a. Pedoman Wawancara
b. Dokumentasi lain yang Relevan
c. Jadwal Penelitan
d. Surat Keterangan
e. Biodata Peneliti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

a. Tabel 1.1 Jumlah Perempuan di DPR RI 4
b. Tabel 1.2 Jumlah Perempuan di DPRD Jawa Timur 5
c. Tabel 1.3 Jumlah Perempuan di DPRD Kab Gresik 6
d. Tabel 1.4 Jumlah Perempuan PPP di DPRD Gresik 7
e. Tabel 4.1 Perolehan Suara atau Kursi Pemilu 2014 di Gresik 66
f. Tabel 4.2. Daftar Nama Pengurus LP2 70
g. Tabel 4.3. Pendaftaran Calon Anggota Legislatif 2019 di DPC PPP Gresik 77
h. Tabel 4.4. Scor Angka Penetapan Nomer Urut Caleg PPP Kab Gresik Pemilu 2019 79
i. Tabel 4.5. Hasil Scoring Caleg DPRD Gresik dari PPP 81
j. Tabel 4.6. Daftar Caleg Tetap (DCT) PPP Gresik 219 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasana berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, *lobbying*, dan sebagainya.[1]

Menurut Samuel P. Huntinton menyatakan bahwa sebuah sistem politik sudah dapat di katakan demokrasi bila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.[2] Pemilu juga merupakan salah satu sarana dan prasarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Rakyat tidak dilibatkan langsung dalam proses pengambilan keputusan akan tetapi

[1] Mirriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) Hlm.461.
[2] Samuel P. Huntion, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, (Jakarta: Grafitri, 1997), Hlm.5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diwakilkan kepada wakil yang telah mereka pilih melalui suatu ajang pemilihan.

Partai politik juga merupakan bagian dari sistem politik yang paling bertangung jawab dalam mengasilkan para pemimpin-pemimpin yang berkualitas untuk mengasilkan pemimpin yang berkualitas tersebut maka perlu dikembangkan sistem rekrutmen dan pola kaderisasi anggota partai politik yang baik dan benar. Bagus atau tidaknya sistem kaderisasi suatu partai politik dapat dilihat dari kemampuan kader suatu partai dalam bersaing dengan kader yang berasal dari partai lain dengan catatan persaingan yang terjadi adalah persaingan yang sehat. Dalam membentuk kader yang siap tanding maka kaderisasi adalah hak yang mutlak dilakukan oleh parpol. Parpol dengan pola kaderisasi yang rapi disertai penjejangan kader yang memadai, dan komitmen yang tinggi terhadap kaderisasi akan menelorkan kader-kader mampu dan siap menduduki jabatan-jabatan politik. Sehingga secara ideal, dalam pemilihan, baik dan pemilihan eksekutif maupun legislatif merupakan pertarungan antara kader terbaik partai politik.

Partai politik salah satu faktor pendorong pertumbuhan jumlah perempuan di dunia politik. Namun kita ketahui saat ini partai politik malah menjadi faktor penghambat bagi pertumbuhan jumlah perempuan pada perpolitikan di Indonesia saat ini. Banyak alasan yang di kemukakan oleh partai politik kepada publik untuk menutupi permasalahan gender pada perpolitikan sehingga dapat dijadikan alasan pembenarannya. Salah satu alasan yang diutarakan oleh partai politiknya minimnya perempuan yang memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kredibilitas dan intelektual yang memadai padahal jika melihat di lapangan banyak perempuan yang mempunyai kredibilitas dan intelektual yang bagus bahkan melebihi kaum laki-laki. Fenomena ini terjadi dan dirasakan oleh kaum perempuan hampir diseluruh Indonesia mereka merasakan adanya diskriminasi yang dilakukan oleh partai politik terhadap kaumnya.[3] Untuk merealisasikan tuntutan ini pemerintah membuat undang-undang untuk mengatur keterlibatan kaum perempuan untuk menjadi anggota legislatif melalui partai politik yang ada. Terdapat Undang-Undang Republik Indonesia nomer 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terdapat pasal 172 yakni tentang peserta pemilu untuk pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/kota adalah partai politik. Pasal 173 menjelaskan tentang yang *pertama* partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU yang *kedua* partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan contohnya memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, bersetatus badan hukum sesuai dengan undang-undang tentang partai politik dan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik pusat dan yang *ketiga* partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana di maksud pada ayat 2 tidak di verifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu.[4]

Secara empirik keterwakilan politik perempuan di Indonesia menemui sejumlah kendala problematik, seperti kesenjangan keterwakilan, baik secara

[3] Dr. Muhadam Labodo/ Teguh Ilham, S. Stp. *Partai Politik Dan System Pemilihan Umum Di Indonesia*. (Jakarta:PT Gremedia Pustaka Utama 2013) Hal 231-232.
[4] http://www.hukumonline.com/pusatdata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

formal ataupun secara substansial. Dengan memperhatikan hasil Sensus Penduduk Indonesia pada tahun 2010, bahwa jumlah penduduk Indonesia adalah sejumlah 237.556.363 orang, dengan 119.507.580 orang terdiri dari laki-laki dan 118.048.783 orang terdiri dari perempuan. Dengan demikian, rasio prosentase perbandingan antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan berada dalam kisaran 51. 49. Meskipun begitu, hasil Pemilu setelah masa orde baru mengindikasiakan adanya ketimpangan keterwakilan pada aras nasional, sebagaimana terlihat dalam tabel sebagai berikut

Tabel 1.1.

Jumlah Perempuan di DPR RI

Pemilu	Jumlah anggota DPR	Jumlah anggota DPR perempuan	Persentase
1999	500	45	9.00%
2004	550	61	11,09%
2009	560	101	17,86%
2014	560	111	19.8%

Sumber: Sekretariat DPR dan Komisi Pemilihan Umum

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat jelas, bahwa tingkat keterwakilan perempuan di DPR RI pada tiga kali pemilu pasca Orde Baru maksimal mencapai 17,86 persen, minimal mencapai 9.00 persen. Meskipun masih jauh dari ekspektasi, namun ada trend semakin meningkatnya prosentase keterwakilan politik perempuan dari 9,00 persen pada pemilu 1999, naik menjadi 11,09 persen pada pemilu 2004, dan naik kembali menjadi 17,86 persen pada pemilu 2009. Dan di tahun 2014 presentase perempuan di DPR RI kembali naik dari tahun tahun sebelumnya yakni 19.8%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ternyata, ketimpangan keterwakilan politik perempuan tidak hanya terdapat di aras nasional akan tetapi, juga terdapat di aras lokal. Sebagai contoh adalah hasil pemilu legislatif pada DPRD Propinsi Jawa Timur selama empat kali pemilu setelah masa orde baru, sebagaimana tergambarkan dalam tabebel sebagai berikut.

Tabel 1.2.

Jumlah Perempuan di DPRD Jawa Timur

Pemilu	Jumlah anggota DPRD jatim	Jumlah anggota DPRD perempuan jatim	Persentase
1999	100	11	11%
2004	100	16	16%
2009	100	17	17%
2014	100	15	15%

Sumber: Sekretariat DPRD Jawa Timur dan Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur.

Berdasar pada tabel 1.2 diatas, maka bisa dilihat dengan jelas bahwa tingkat keterwakilan perempuan pada DPRD Profinsi Jawa Timur dalam empat kali pemilu setelah masa orde baru paling banyak hanya berada pada kisaran 17,00 persen, dan paling sedikit berada dalam kisaran 11.00 persen. Walaupun masih jauh dari harapan, akan tetapi terdapat trend yang cenderung meningkat dalam presentase keterwakilannya politik perempuan. Yaitu dari 11,00 persen pada pemilu 1999, naik menjadi 16,00 persen pada pemilu 2004, dan naik kembali menjadi 17,00 persen pada pemilu 2009, tapi di tahun 2014 terjadi penurunan sedikit yakni 15,00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.3.

Jumlah Perempuan di DPRD kab Gresik

Pemilu	Jumlah anggota DPRD kabupaten Gresik	Jumlah anggota DPRD perempuan kabupaten Gresik	Persentase
1999	50	2	4%
2004	50	3	6%
2009	50	9	18%
2014	50	5	10%

Sumber: Sekretariat DPRD kabupaten Gresik dan Komisi Pemilihan Umum Gresik.

Dari tabel di atas 1.3. menjelaskan tentang jumlah perempuan legislatif di Kabupaten Gresik. Semenjak pasca orde baru sampai sekarang terjadi pasang surutnya jumlah anggota legislatif perempuan bisa kita lihat dari tahun 1999 hanya 2 perempuan yang duduk di kursi legislatif dan hanya 4,00 persen, tahun berikutnya yakni tahun 2004 ada sedikit peningkatan menjadi 6,00 persen dan yang menduduki 3 anggota legislatif, di tahun 2009 terjadi pelonjakan yang cukup tinggi yakni 9 anggota legislatif perempuan kalo di persenkan 18,00 persen cukup tinggi di bandingkan tahun tahun sebelumnya, dan yang terakir yakni di tahun 2014 terjadi sedikit penurunan yakni 5 anggota legislatif perempuan atau 10,00 persen saja. Dari 4 priode ini bisa kita lihat kurang nya partisipasi perempuan dalam legislatif saat ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.4.

Jumlah Perempuan PPP di DPRD Gresik

Pemilu	Jumlah anggota DPRD kabupaten Gresik	Jumlah anggota DPRD perempuan kabupaten Gresik dari PPP	Persentase
1999	50	-	
2004	50	-	
2009	50	1	2%
2014	50	1	2%

Sumber: Sekretariat DPC PPP Gresik

Bisa kita lihat tabel di atas yakni tabel 1.4. menjelaskan pasang surutnya persentase partisipasi perempuan di partai persatua pembangunan di tahun pasca orde baru partai persatuan pembangunan tidak sama sekali mendapatkan kursi di DPRD Gresik, sama juga di tahun 2004 partai persatuan pembangunan juga tidak sama sekali mendapatkan kursi perempuan, beda di tahun 2009 PPP terjadi peningkatan meskipun hanya 1 kursi perempuan, dan di tahun 2014 saat ini juga hanya 6 kursi perempuan kalo di persentasekan hanya 2,00 persen dan di tahun ini PPP optimis mendapatkan kursi lebih banyak di karnakan juga terdapat jumlah keterwakilan perempuan 30%.

Dan di sini tugas setiap parpol mencari perempuan yang mempunyai intelektual dan mempunyai kebasisan dalam cara berpolitik yang baik dan benar. Dalam hal ini PPP mengusung 21 kandidat perempuan calon legislatif di Kabupaten Gresik, dalam hal ini PPP sudah memenuhi kuota yang di wajibkan oleh KPU Kabupaten Gresik. PPP mengusung 50 kandidat laki-laki 29 dan perempuan 21 PPP optimis bisa memenangkan pemilihan yang akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendatang. Caleg laki laki dan perempuan akan membuat strategi pemenangan perdapilnya. Dapil satu di isi 7 yang berdomisili Kecamatan (Gresik-Kebomas), Dapil dua di isi 5 caleg yang berdomisili Kecamatan (Cerme-Duduk sampean), Dapil tiga di isi 7 baleg yang berdomisili Kecamatan (Menganti- Kedamean), Dapil empat di isi 7 caleg yang berdomisili Kecamatan (Driyorejo- Wringinanom Anom), Dapil lima di isi 5 caleg yang berdomisili Kecamatan (Benjeng- Balongpanggang), Dapil enam di isi 4 caleg yang berdomisili (Bawean), Dapil tujuh di isi 6 caleg yang berdomisili Kecamatan (Dukun-Ujung Pangkah-Panceng) dan yang terakhir Dapil delapan di isi 9 caleg yang berdomisili Kecamatan (Manyar- Bungah- Sidayu).

PPP membuat rekrutmen pemilihan dengan cara yang efesien, dengan adanya tindakan rekruitmen yang dilakukan PPP diharapkan para caleg yang maju nanti sangat kredibilitas dan berpendidikan sehingga nantinya kelak caleg tersebut lolos menjadi wakil rakyat dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat. Rekruitmen yang dilakukan PPP sendiri bisa berasal dari internal partai yang merupakan kader kader partai dan juga bisa melakukan rekruitmen dari eksternal partai bagi orang yang lepas dari lingkungan partai. PPP akan melakukan rekruitmen sebaik baiknya sehingga caleg yang lulus benar – benar terbaik.

Sebagai salah satu peserta pemilu legislatif 2019 PPP di Kabupaten Gresik melakukan rekruitmen caleg baik perempuan maupun caleg laki-laki. Sebuah tanggung jawab dari DPC PPP Kabupaten Gresik untuk melaksanakan rekruitmen caleg yang berasal dari internal PPP. Kader – kader PPP baik laki-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki maupun perempuan yang menonjol menjadi prioritas bagi pengurus harian dan LP2 (Laznah Pemenangan Pemilu) selaku panitia rekruitmen untuk mengusung para kader tersebut menjadi caleg. Tentu semua itu tergantung pada kadernya bersedia diusung atau tidak sehingga PPP sendiri tidak melanggar hak asasi dari kader tersebut.[5]

Syarat menjadi caleg PPP di semua Wilayah Indonesia adalah sama, atau tidak ada perbedaan, oleh karenanya para caleg akan memenuhi berbagai syarat yang sama. Syarat yang pertama, sebagaimana ditetapkan dan di implementasikan pada DPC PPP Kabupaten Gresik, adalah keharusan untuk setiap caleg yang mendaftar di PPP haruslah seorang muslim (beragama Islam). Keharusan ini berdasarkan pada pasal 2 AD/ART PPP, bahwa: "PPP berasaskan Islam". Oleh karenaya, PPP mengharuskan para caleg harus beragama islam. Tidak hanya pada caleg, akan tetapi juga pada seluruh pengurus dan kader-kader PPP merupakan umat Islam. Sejak dulu sampai sekarang, PPP terus consist pada asasnya yang berpegang teguh pada agama islam. Tentunya, PPP sebagai partai awal yang terlahir dengan asas Islam, PPP menginginkan menjaga konsistensi tersebut. Di samping itu, di dalam internal PPP ini juga berisi para kyai dan ulama yang terkenal, sehingga Islam di dalam PPP sangat kental dan sulit untuk pudar.[6]

Syarat kedua yang juga penting adalah kewajiban setiap caleg, baik laki-laki ataupun perempuan, untuk memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) partai.

---

[5] Ainur Rofieq. *Fungsi Rekruitmen Politik Pada Calon Legislatif Partai Persatuan Pembangunan (PPP)*, Jurnal Ilmu Pemerintahan (Vol. 1 No. 2, 2011) Hal 65-79.

[6] ADART PPP Bab II Ayat 2 (asas, sifat, dan prinsip perjuangan) Thn 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harapannya dengan memiliki KTA tersebut berarti dirinya telah menjadi keluarga besar PPP.

Syarat terakhir yang wajib dipenuhi para caleg perempuan adalah sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani maksudnya sehat dari segi fisik sebelum para caleg perempuan mendaftarkan diri, tidak terdapat penyakit parah atau cacat permanen yang dideritanya. Sehat rohani lebih terletak pada kesehatan psikologi dan kejiwaannya, semisal tidak pernah menderita kelainan kejiwaan seperti gila.[7]

Untuk rekruitmen caleg perempuan hampir sama dengan rekruitmen caleg pria yang membedakan hanya pada mandat yang diberikan kepada organisasi PPP. Dalam rekruitmen caleg perempuan mandat yang diberikan terfokus kepada organisasi sayap WPP (Wanita Persatuan Pembangunan) sebagai wadah berkumpulnya para kader perempuan PPP. WPP sendiri memang berfokus pada kader perempuan PPP dimana kegiatan organisasi tersebut untuk memberdayakan perempua PPP. Sehingga sangat pas apabila mandat dari DPC PPP turun ke WPP Kabupaten Gresik untuk mengusulkan kadernya bisa pengurus harian atau anggotanya untuk menjadi salah satu daftar calon caleg perempuan.[8] Bermula dari permasalahan di atas peneliti tertarik untuk mengamati Strstegi Rekrutmen Partai Persatuan Pembangunan dalam meningkatkan partisipasi perempuan. Maka, tema yang menjadi landasan

---

[7] Ibid

[8] Mari Rosieana. *Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Kabupaten Gresik Studi Pada Anggota DPRD Kabupaten Gresik.* Ejurnal Pemerintah Integratif Vol. 1 No. 1, thn 2013 Hal.112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam penelitian ini adalah : ***"STRATEGI REKRUTMEN CALEG PEREMPUAN PADA PEMILU 2019 STUDI KASUS DPC PPP GRESIK"***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil pemaparan di atas maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi rekrutmen caleg perempuan dari DPC Partai Persatuan Pembangunan Gresik pada pemilu 2019?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam rekrutmen caleg perempuan di DPC Partai Persatuan Pembangunan Gresik?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah, sudah tentu adanya tujuan yang diharapkan dari penulisan skripsi ini, adapun tujuan-tujuan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi rekrutmen caleg perempuan di DPC PPP Gresik pada pemilu 2019.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pengambat dalam rekrutmen caleg perempuan di DPC PPP Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a. Dalam rangka mengembangkan ilmu politik khususnya mengenai strategi rekrutmen caleg perempuan (PPP) untuk bisa memenangkan dan mendapatkan kursi di DPRD kabupaten Gresik.
   b. Dalam rangka pengembangan potensi potensi caleg legislatif dan memberikan jembatan para caleg yang mempunyai hambatan dalam pemilihan legislatif 2019 di kabupaten Gresik.
2. Manfaat Praktis
   a. Menjadi sumbangsih pemikiran bagi para caleg perempuan di DPC kabupaten Gresik.
   b. Mengembangkan pola pikir caleg perempuan agar tidak ada pengambat dalam pemilihan legislatif yang akan dating.

E. Definisi Konseptual

Untuk menghindari kesalah fahaman dalam penafsiran terhadap judul skripsi ini maka penulis perlu menjelaskan maksut dari istilah-istilah di dalamnya sebagai berikut:

1. Strategi Rekrutmen

   Rekrutmen politik dan sosialisasi politik merupakan dua hal yang saling berkaitan, karena rekrutmen politik merupakan salah satu bagian dari sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah suatu proses memperkenalkan sistem politik kepada seseorang dan bagaimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan jabatan pada lembaga-lembaga politik termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik.[9] Rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara, karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga politik yang ada.

2. Partai Persatuan Pembangunan

Partai Persatuan Pembagunan (PPP) didirikan tanggal 5 Januari 1973, sebagai hasil fusi politik empat partai Islam, yaitu Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (SI), dan Partai Islam Perti. Fusi ini menjadi simbol kekuatan PPP, yaitu partai yang mampu mempersatukan berbagai faksi dan kelompok dalam Islam. Untuk itulah wajar jika PPP kini memproklamirkan diri sebagai "Rumah Besar Umat Islam". PPP yang berasaskan Islam berketetapan hati dan bertekad dengan segenap kemampuannya untuk berusaha mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, yakni terwujudnya masyarakat adil dan makmur, rohaniah dan jasmaniah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

[9] Hafied Cangara. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, Dan Strategi.* (Jakarta: 25 Januari 2011 Rajawali Pers).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. PPP berasaskan Islam dan berlambangkan Ka'bah. Akan tetapi dalam perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan Orde Baru, PPP pernah menanggalkan asas Islam dan menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peratururan perundangan yang berlaku sejak tahun 1984.[10]

3. Partisipasi Politik Perempuan

Kata partisipasi merupakan hal tentang turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan atau berperan serta. Peran politik terkait erat dengan aktivitas-aktivitas politik mulai dari peranan para politikus profesional, pemberian suara, aktivitas partai sampai demonstrasi. Dalam pengertian umum, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Kegiatan ini dapat berupa pemberian suara dalam Pemilu, menjadi anggota suatu partai dan lain sebagainya. Dalam Ihromi, Kajian Wanita dalam Pembangunan, Herbert McClosky mengatakan bahwa Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.[11]

[10] Tim Litbang Kompas, *Partai Persatuan Pembangunan Indonesia* (Jakarta Pt Kompas Media Nusantara, 1999) Hlm 161

[11] Herbert Mcclosky, *Political Participation, Partisipasi Dan Partai Politik* Jakarta,Hlm 13-23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kajian Pustaka

Sebelum menganalisa lebih lanjut dan untuk menghindarkan dari penelitian yang sama dalam satu obyek, maka peneliti akan menelaah karya lain yg membahas permasalahan ini, mengenai strategi rekrutmen Partai Persatuan Pembangunan dalam meningkatkan caleg perempuan di legislatif kabupaten Gresik.

1. Jurnal karya M Reza Atmaja Hadi tahun 2017 yang berjudul "*Analisa proses rekrutmen calon legislatif perempuan dalam pemilu legislatif 2014 di kota Semarang (studi kasus Partai Persatuan Pembangunan)"* jurnal ini menjelaskan tentang pemilihan legislatif banyak partai politik menghadapi beberapa masalah, keberadaan representasi perempuan. Adanya sistem kuota 30% dan sistem zypper membuat semua partai politik lebih fokus mempersiapkan perwakilan perempuan mereka. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang memfokuskan pada perekrutan perwakilan perempuan di DPC PPP di Semarang. Hasil menunjukkan bahwa perekrutan oleh DPC PPP di Semarang menghasilkan perwakilan perempuan yang tidak bergabung dalam pemilihan itu sendiri. DPC PPP di Semarang adalah salah satu wakil dari pemilihan legislatif 2014 di Kota Semarang. Untuk mempersiapkan perwakilan legislatif perempuannya, DPC PPP di Semarang telah mengadakan rekrutmen yang diikuti oleh perwakilan wanitanya. Hasil rekrutmen DPC PPP di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semarang dapat memenuhi kedua aturan yang disebutkan sebelumnya dalam pemilihan legislatif 2014.[12]

2. Jurnal karya Hendrawati 2014 dengan judul "*Rekrutmen perempuan menjadi politisi (Legislatif)"* menjelaskan tentang untuk mengetahui dan melihat rekrutmen atau pencalonan perempuan menjadi politisi (legislatif). Hasil penelitian menunjukan bahwa opini public melihat keberadaan perempuan sebagai politisi lebih konprehensif berpeluang dalam UU No.8 Tahun 2012 untuk mendorong penguatan peran, posisi dan strategis tentang keterwakilan perempuan 30% di lembaga legislatif. Namun apa yang terjadi, proporsi anggota legisatif perempuan yang terpilih gagal mencapai affirmative action 30%, disamping budaya patriarki masih membayangi para caleg perempuan juga gagalnya pengkaderan dan pendidikan politik serta rekrutmen politisi perempuan (DPR) yang kurang selektif sehingga sulit memperkuat kepercayaan pemilih. Akhirnya jatah keterwakilan perempuan mengalami penurunan, baik ditingkat, lokal, provinsi, maupun tingkat pusat pada pemilu 2014.[13]
3. Jurnal karya Drs. S amsir, M.Si dengan judul *"implemtasi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam rekrutmen calon legislatif oleh partai politik di kota padang"* jurnal ini menjelaskan tentang ketidakterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif serta adanya

[12] M Reza Atmaja Hadi "*Analisa Proses Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014 Di Kota Semarang (Studi Kasus Partai Persatuan Pembangunan)"* (jurnal,Fisip Undip 2014) Hal 24 vol 14 no 2

[13] Hendrawati *"Rekrutmen Perempuan Menjadi Politisi (Legislatif)"* (jurmal penelitian pers dan komunikasi pembangunan) Banjarmasin Hal 131 vol 18 no 2 thn 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penegasan pasal 65 ayat 1 UU No.12 tahun 2014 yang menyatakan bahwa partai politik dalam menetapan calon legislatifnya harus mengakomodir perempuan sebesar 30% diantaranya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penjaringan dan penyaringan calon legislatif oleh partai politik menggunakan mekanisme yang variatif dan tergantung pada kebijakan partai itu sendiri. Hanya saja beberapa indikator yang digunakan terdapat kesamaan. lndikator tersebut diantaranya adalah tingkat pendidikan, pengalaman berorganisasi, latar belakang sosial, partisipasi dalam partai politik, prestasi serta hal-ha1 yang terkait dengan kapabilitas, akseptabilitas serta popularitas daripada calon.[14]

4. Skripsi karya Nuni Silvana dengan judul "*keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik dan pencalonan legislative.*" Skripsi ini menjelaskan bahwa gerakan perempuan dalam wilayah Indonesia tidak bisa dipungkiri lagi, dan dikarenakan pengaruh dari gerakan perempuan dalam wilayah internasional. Puncaknya dengan adanya ratifikasi pada Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women (CEDAW) atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan selanjutnya menjadi Undang-undang No. 7 Tahun 1984. Hak-hak politik juga termasuk bagian dari perjuangan perempuan Indonesia

[14] Drs. S Amsir, M.Si. Dengan *"Implemtasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Rekrutmen Calon Legislatif Oleh Partai Politik Di Kota Padang"* (jurnal Fisip UNP) Hal 14-15 vol 16 no 2 thn 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Dalam perhal partisipasi politik, perempuan sudah diberikan kuota tersendiri, baik pada kepengurusan partai politik ataupun pada pencalonan legislatif, yaitu sebanyak 30 %. Akan tetapi, ternyata pengaturan tersebut masih dianggap tidak serius, atau setengah hati. Hal ini dikarenakan bahwa tidak terdapat sanksi tegas bagi partai politik yang tidak melaksanakan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dari sisi sosiologis sendiri, juga masih menyimpan berbabagi masalah yang rumit, dimulai dari minimnya minat perempuan dalam ranah politik ataupun masalah bias gender yang dialami perempuan, khususnya perempuan Indonesia pada masa-masa ini. Kebijakan pemilu seperti tersebut di atas dilakukan guna memperkuat kebijakan affirmasi, dan sepertinya belum juga memberikan hasil optimal jika melihat aspek kuantitas perempuan yang memperoleh kursi dalam lembaga legislatif. Problem ini tentunya belum mencakup aspek kualitas dari perempuan yang memperoleh kursi dalam lembaga legislatif.[15]

Dalam kajian pustaka di atas bahwasanya terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitihan. Terdapat persamaan bahwasanya adanya sistem 30% dan sistem zipper membuat partai politik lebih fokus mempersiapkan kader perempuan yang membunyai bakat berpolitik dan intelektual yang tinggi, serta menjelaskan tentang rekrutmen atau pecalonan perempuan agar bisa

[15] Nuni Silvana. Judul "*Keterwakilan Perempuan Dalam Kepengurusan Partai Politik Dan Pencalonan Legislatif*" (Skripsi: Fisip Unsoed Purwokerto 2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi politisi. Selanjutnya yakni perbedaaan dari penelitian di atas bahwasanya penjaringan setiap calon legislatif oleh partai politik mengunakan mekanisme yang variatif dan tergantung pada kebijakan partai itu sendiri tanpa melihat kapasitas dan ilmu yang di miliki, hanya saja ada beberapa indikator yang di gunakan terdapat kesamaan yakni seperti di tingkat pendidikan dan pengalaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KAJIAN TEORITIK

A. Teori Rekutmen Politik

Dalam partai politik terdapat beberapa fungsi penting yang dijalankan partai sebagai sarana dalam mengaplikasikan tujuan mereka. Salah satu fungsi partai politik yang terkait dengan ini adalah rekrutmen partai politik.[16] Ada 3 pendapat mengenai rekrutmen politik yang pertama dari Ramlan Surbakti mengenai seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatkan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peran dalam system politik pada umumnya, yang kedua dari Rush dan Althoff mengenai proses pengrekrutan politik dan yang ketiga yakni oleh Richard.S Katz dan William Crotty menerapkan kriteria rekrutmen politik.

Rekrutmen merupakan suatu proses untuk mencari dan menyeleksi anggota untuk kegiatan regenerasi dari sebuah organisasi, baik partai politik, lembaga pemerintahan maupun organisasi lainnya. Namun, rekrutmen lebih dikenal dalam bahasa politik seperti yang terdapat dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik yang menyebutkan: proses mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai.[17] Istilah rekrutmen lebih dikenal dalam bahasa perpolitikan, dan kemudian diadopsioleh

[16] Amal, Ichlasul. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta 2014) Hal: 28.

[17] Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) Hal:164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh partai politik seiring dengan kebutuhan partai akan dukungan kekuasaan dari rakyat, dengan cara mengajak dan turut serta dalam keanggotaan partai tersebut. Rekrutmen sendiri memiliki acuan waktu dalam prosesnya, maka pada saat itu pula rekrutmen dilakukan pada saat partai memerlukan. Pendapat lainnya yang mengemukakan pengertian rekrutmen politik oleh Ramlan Surbakti dalam buku Memahami Ilmu Politik yang dimaksud rekrutmen politik adalah:

> "Seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya, dengan mengkhususkan kepada orang-orang yang mempunyai bakat yang cukup menonjol, partai politik menyeleksi dan menempatkannya sebagai seorang calon pemimpin"[18]

Rekrutmen politik partai dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan sebagai ajang untuk mencari dan menyeleksi keanggotaan baru untuk diikutsertakan dalam partai politik sebagai pembelajaran politik, disamping untuk melakukan regenerasi dalam partai politik tersebut maka dilakukan melalui mekanisme yang diterapkan oleh partai. Pengaruh rekrutmen politik sangat menentukan dalam regenerasi kehidupan partai. Hal itu dikarenakan partai memerlukan penyegaran keanggotaan untuk dapat bertahan dalam mempertahankan kekuasaan politiknya dimata masyarakat.

Adapun mekanisme rekrutmen politik partai yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff adalah: proses pengrekrutan politik memiliki dua sifat yaitu:

[18] Ramlan Surbakti *memahami ilmu politik* (Jakarta: PT. Gramedia Widisuasarana, 1992). Hal:118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sifat tertutup adalah suatu sistem pengrekrutan administratif yang didasarkan atas patronase.
2. Sifat terbuka; adalah sistem yang berdasarkan pada ujian-ujian terbuka.[19]

Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur rekrutmen yang berbeda. Anggota kelompok yang direkrut adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat di butuhkan untuk suatu jabatan politik. Setiap partai juga memiliki pola rekrutmen yang berbeda. Sistem rekrutmen politik menurut Rush dan Althoff dibagi menjadi dua cara. Pertama rekrutmen terbuka, yakni dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga Negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Dasar penilaian dilaksanakan melalui proses dengan syaratsyarat yang telah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan yang objektif rasional. Dimana setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi. Kedua, rekrutmen tertutup yaitu adanya kesempatan untuk masuk menduduki jabatan politik tidaklah sama setiap warga negara artinya hanya individu-individu tertentu yang dapat menduduki jabatan politik.[20]

[19] Michael Rush, Phillip Althoff. *Pengantar Sosiologi Politik, Alih Bahasa Oleh Kartini Kartono,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2007) Hal:247.

[20] Hesel Nogi Tangkilisan. *Kebijakan Publik Yang Membumi, Yogyakarta* (Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia 2003) Hal:188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kriteria rekrutmen politik pemimpin, syarat/ kriteria Caleg oleh Partai dikolaborasikan dengan kriteria untuk memilih dan menetapkan calon legislatif oleh Richard.S Katz dan William Crotty, antara lain yaitu[21]
    a. Usia, dimana seorang calon haruslah memiliki usia yang cukup yakni 21 tahun untuk dapat dicalonkan menjadi anggota legislatif. Usia adalah hal yang penting karena dapat menentukan tingkat analisa seseorang dalam menghadapi masalah. Biasanya faktor usia juga dapat mengukur kematangan dan pengalaman seseorang dalam masyarakat.
    b. Popularitas, yakni seorang calon adalah orang yang dikenal masyarakat luas dan memiliki reputasi yang baik.
    c. Pendidikan, yaitu seorang calon anggota legislatif harus mempunyai tingkat pendidikan yang bagus minimal sarjana agar calon tersebut dapat memahami dan mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat.
    d. Keuangan dan finansial, hal ini adalah suatu syarat yang juga dianggap penting, seorang calon anggota legislatif haruslah mempunyai dana yang cukup besar yang digunakan ketika mengadakan kampanye.
2. Kontrol rekrutmen politik Caleg, merupakan peran yang dilakukan DPC Partai dalam mengontrol jalannya rekrutmen Caleg. Adapun pelaksanaan kontrol rekrutmen politik dilakukan pada

[21] Richard.S Katz Dan William Crotty *Handbook Of Party Politice* (London: Sagen Publications2015) Hal: 89-91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bakal calon Legislatif dari internal partai.

b. Bakal calon Legislatif dari eksternal partai.

Dari teori di atas parpol pastilah membuat seleksi atau rekrutmen kepada para caleg legislatif. Rekrutmen sendiri memiliki acuan waktu dalam prosesnya, maka pada saat itu pula rekrutmen di lakukan pada saat partai sangat membutuhkan. Dan di saat seperti ini parpol sangat membutuhkan kader kader professional untuk maju di pemilihan legislative. Dan Pastinya semua parpol menginginkan kader kader yang baik serta mempunyai intelektual tinggi. Dalam teori ini banyak penjelasan bagaimana atau mekanisme rekrutmen politik yang baik dan banar. Seperti halya teori dari Richard dan William Crotty menjelaskan kalua rekrutmen politik ini di kebanyakan partai persaratanya sama yakni usia 21 tahun, mempunyai popularitas di kalangan masyarakat, pendidikan yang tinggi, dan keuangan atau dana yang cukup besar.

B. Teori Representasi Perempuan

Hanna Fenichel Pitkin mengemukakan bahwa representasi merupakan bentuk modern dalam demokrasi. Dalam konsepsi Pitkin, setidaknya ada empat cara memandang representasi politik.[22]

Pitkin membagi representasi menjadi empat bentuk yang berbeda. Pertama, representasi otoritas yaitu ketika representator secara legal diberi hak untuk bertindak. Kedua, representasi deskriptif yaitu ketika representator

[22] www. Journal Unair.ac.id, Dwi Windyastuti. Politik Representasi Perempuan, 31 agustus 2014 21:22 Wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membela kelompok yang memiliki watak politik yang sama. Ketiga, representator simbolis ketika representasi menghasilkan sebuah ide bersama. Keempat, representasi substantif ketika representator membawa kepentingan "ide" represented ke dalam area kebijakan publik.

Pertama, perspektif otorisasi melihat bahwa representasi merupakan pemberian dan pemilikan kewenangan oleh wakil sebagai orang yang diberi kewenangan untuk bertindak. Wakil memiliki hak untuk bertindak, yang sebelumnya tidak dimilikinya. Sebaliknya terwakil yang memberikan beberapa haknya, harus ikut bertanggungjawab atas konsekuensi tindakan yang dilakukan oleh wakil. Pandangan otoritas ini memusatkan pada formalitas hubungan keduanya atau yang disebut sebagai pandangan “formalistik”.

Kedua, representasi deskriptif yaitu seseorang dapat berpikir dalam kerangka sebagai *“standing for”* segala sesuatu yang tidak ada. Wakil bisa berdiri demi orang lain yang diawakili, menjadi substitusi untuk orang lain, atau mereka cukup menyerupai orang lain. Representasi deskriptif menggambarkan bahwa wakil mendeskripsikan konstituen, biasanya ditandai dengan karakteristik yang nampak seperti warna kulit, gender, atau kelas sosial. Model ini dipahami sebagai kesamaan deskriptif antara wakil dengan yang diwakili. Ciri pandangan ini kebanyakan dikembangkan di antara yang membela representasi proporsional, bahkan pandangan ini dianggap sebagai prinsip fundamental representasi proporsional yang berupaya menjamin bahwa badan perwakilan mencerminkan hitungan matematis *“more or less”* atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konstituenya. Proporsionalitas wakil ini terkkait dengan komposisi komunitas, sebagai kondensasi dari keseluruhan.

Ketiga, representasi simbolik berarti merepresentasikan sesuatu yang bukan merepresentasikan fakta. Ide person dapat direpresentasikan tidak dengan peta atau potret, tetapi dengan simbol, dengan disimbolkan atau diwakili secara simbolik. Meskipun sebuah simbol merepresentasikan *"standing for*" segala sesuatu, tetapi tidak menyerupai apa yang diwakili. Symbol memiliki ciri yang membantu merasionalisasi signifikansi simboliknya, sehingga simbol mensubstitusi yang diwakili dan simbol mensubstitusi apa yang disimbolkan.

Keempat, representasi substantif yaitu terepresentasinya ide dan kepentingan perempuan dalam formulasi kebijakan, artinya representasi substantif ketika representator membawa kepentingan "ide" represented ke dalam area kebijakan publik.

C. Teori Strategi Politik

Strategi dapat didefinisakan sebagai "ilmu tentang teknik atau taktik, cara atau kiat muslihat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan". Lalu menurut Pater Schroeder, bahwa strategi politik merupakan ilmu tentang teknik, taktik, cara, kiat yang dikelola oleh politisi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, merumuskan dan melaksanakan keputusan politik sesuai yang dinginkan. Dan digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik. Contohnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah pemberlakuan aturan baru, pembentukan suatu struktur baru dan administrasi pemerintah atau dijalankannya program deregulasi, privatisasi atau desentralisasi.[23] Tanpa strategi politik perubahan jangka panjang atau proyek-proyek besar sama sekali tidak dapat diwujudkan.

Dalam perencanaan konseptual strategi politik setidaknya ada sistematika 10 langkah strategi politik, yaitu :

1. Merumuskan Misi

   Dalam strategi politik, misi bisa berarti: persetujuan atas suatu posisi terentu, partisipasi dalam suatu tugas tentu, dipilih sebagai kandidat. Dalam perencanaan suatu karir politik, maka misi haruslah menjelaskan untuk siapa strategi tersebut direncanakan. Sehingga, misi bisa menetapkan suatu kerangka atau batasan. Misi harus mengidentifikasi jangka waktu, hingga kapan secara keseluruhannya harus digapai, di samping misi tidak boleh dirumuskan dengan cara yang klewat optimis yang berakibat menjadi kurang realitis.

2. Penilaian Situasional dan Evaluasi

   Analisa situasii dan evaluasi membicarakan fakta-fakta yang di kumpulkan, yang di kelompokan kedalam kekuatan dan kelemahan, juga perkiraan kemungkinan keberhasilan yang terlealisasi.

[23] Peter Schroeder, *Strategi Politik* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), Hlm 5-6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perumusan Sub-Strategi

Ketika langkah penilaian situasional lebih menyibukkan diri dengan kondisi dan situasi masa lalu, maka fokusnya harus begerak maju kedepan guna perumusan sub strategi. Sedangkan langkah-langkahnya adalah: menyusun tugas-tugas, yang merupakan strategi dan mengevakuasi strategi. Jika penilaian situasional telah selesai, maka jelaslah sesuatu yang telah di rumuskan akan di jalankan ataukah masih perlu di revisi.

4. Perumusan Sasaran

Sesudah memutuskan sasaran, tanggungjawab mengalihkan strategi pada unit-unit taktis, lalu diimplemintasikan dengan cara pembagian tugas. Arttinya, jika strategi sudah di tetapkan, maka pendekatan guna memanfatkan kekuatan terhadap kelemahan lawan dan guna memecah kelemahan sendiri juga di tetapkan. Tujuan haruslah mengilustrasikan kondisi akhir dari sebuah proses dalam jangka masa tertentu. Tujuan di sini haruslah bisa dicapai dan tidak boleh hanya menjadi ilusi belaka. Tujuan telah di rumuskan, masing-masing strategi haruslah direalisasikan dan dijalankan. Tujuan bertanggung jawab untuk tercapainya tujuan. Oleh sebab itu kuantitas, kualitas jangka waktu dan tanggung jawab haruslah ditetapkan sebagai tujuan di rumuskan.

5. Target Image

Strategi untuk public relations (kegiatan kehumasan) dirumuskan dan di implemtasikan pada tingkat public relations, setelah keputusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai citra yang di inginkan (*target image*) telah ditetapkan. Target image menggambarkan citra yang di harapkan, yang hendak di capai setelah dilaksanakannya rangkaian kegiatan kehumasan yang panjang dalam kelompok target. Target image di tentukan oleh keputusan strategis mengenai perumusan tugas dan pilihan-pilihan yang terkait dengan isu, jenis dan gaya jenis konfrontasi dan orang-orang yang di perhitungkan.

6. Kelompok-Kelompok Target

Kelompok target merupakan kelompok-kelompok masyarakat atau organisasi mereka yang penting guna pencapaian misi. Kelompok-kelompok ini perlu dilakukan pendekatan dalam waktu yang telah di tetapkan. Kelompok-kelompok ini di identifikasi dengan mengintepretasikan keputusan yang bersifat strategis, terutama tujuan taktis, dan dengan melalui analisa citra yang di inginkan. Jika kelompok-kelompok target tersebut sudah didefinisikan, maka fondasi untuk mengimplementasikan strategi komunikatif di tetapkan. Fondasi inilah yang di lengkapi dengan pesan-pesan kelompok target dan instrument-instrument kunci.

7. Pesan Kelompok Target

Kelompok target yang telah dibahas di atas membutuhkan informasi-informasi tertentu berdasarkan keputusan strategi yang telah diambil sebelumnya untuk memungkinkan bereaksi sesuai dengan apa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah direncanakan secara strategis. Informasi ini dapat di komunikasikan secara khusus dengan masing-masing kelompok target, dan tidak untuk semua kelompok target yang ada.

8. Instrumen-Instrumen Strategi

Pemilihan instrument kunci terutama berkaitan dengan aksi aksi dan alat komunikasi yang akan digunakan. Instrument instrument dan aksi ini disesuaikan secara khusus bagi kelompok target. Untuk itu ada syarat bahwa kelompok yang dijadikan kelompok target telah dikenali terlebih dahulu, karena setiap kelompok target telah dikenal terlebih dahulu, karena setiap kelompok target hanya diraih melalui pendekatan atau komunikasi tertentu.

9. Implementasi Strategi

Dalam pengimplementasian strategi, faktor manusia dan faktor operasional perlu di perhitungkan. Sebelum implementasi strategi dilakukan terlebih dahulu perlu diambil keputusan mengenai tujuan taktis, perumusan citra yang diinginkan, identifikasi kelompok target, pesan kelompok target dan instrument kunci. Setelah itu baru lah peraturan untuk implementasi strategi perlu ditetapkan.

10. Pengendalian Strategi

Pengendalian strategi terbagi menjadi dua elemen yang menjunjukkan keberhasilan implementasi suatu strategi. Yang pertama yaitu elemen prinsip pengumpulan data intelejen dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perolehan informasi. Yang kedua yaitu elemen prinsip perlindungan informasi di pihak sendiri.[24]

Politisi akan selalu dihadapkan pada berbagai kemungkinan kerjasama dengan pihak lain. Oleh karenanya, penting untuk mengenal sebelas strategi utama yang diperkenalkan oleh Peter Schroder yaitu strategi *defect*, strategi *cooperate*, strategi *random*, strategi *per kind*, strategi *per nasty*, strategi *spite*, strategi *soft majority*, strategi *tit for tat*, strategi *minstrust*, strategi *prober*, dan strategi *pavlov.*[25]

a. Strategi *Defect*

Strategi defect yaitu menolak bekerja sama pada setiap langkah yang di ambil. *Defect* merupakan strategi yang sangat sederhana, yang senantiasa menolak bekerjasama secara buta, akan tetapi sekaligus mengejar sasaran. Jelaslah terlihat bahwa stategi defect tidak dapat dikalahkan. Tidak terdapat strategi lainnya yang jika dibandingkan secara langsung dapat mengumpulkan lebih banyak poin jika di bandingkan dengan defect, sebab lawan hanyalah mungkin untuk memperoleh hasil bekerja sama atau tidak bekerja sama.

b. Strategi *Cooperate*

Strategi cooperate yaitu strategi bekerja sama pada setiap langkah yang diambilnya. Strategi cooperate adalah lawan dari strategi defect,

[24] Peter Schroeder, *Strategi Politik* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), Hlm 5-6
[25] M.Alfan Alfian, *Menjadi Pemimpin Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008),Hlm 302-303

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan juga mempunyai sifat dan corak yang berlawanan. Cooperate tidak bisa menang, sebab dia hanyalah bisa memperoleh beberapa point atau tidak mendapatkan poin, di mana dalam konteks ini poin yang didapatkan tidak bisa melebihi dari poin lawan. JIka lawan sudi bekerja sama, maka strategi ini tidaklah merugikan, sebab inilah maka cooperate sangat mudah untuk di manfaatkan.

c. Strategi *Random*

Strategi Random adalah strategi yang posisinya ditengah tengah menerima atau menolak. Random memainkan defect atau cooperate dengan probabilitas yang sama. Tidak ada strategi yang bertujuan melakukan kerjasama secara permanen dapat berhasil dengan menggunakan langkah random.

d. Strategi *Per Kind*

Strategi ini dimaksudkan untuk membuat lawan agar merasa aman, lalu anda menyerang supaya anda tetap mampu mengendalikannya. Dengan harapan ia akan menerima penolakan untuk bekerjasama dalam hal yang terjadi saat itu, untuk kemudianmau diajak bekerjasama kembali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Strategi *Per Nast*

Sama seperti per kind hanya polanya dirubah. Strategi ini awalnya tidak menerima kerja sama dengan lawannya tetapi diakhirnya menerima kerjasama dengan pesaingnya.

f. Strategi *Spite*

Strategi Spite adalah bekerja sama dalam langkah yang pertama, kemudian bekerja sama selama lawan belum menolak bekerja sama. Ini adalah strategi yang mempertimbangkan respon lawan, strategi ini adalah strategi yang bersahabat yang menawarkan kooperatif, tetapi kemudian segera mengubah sikapnya ketika lawan tidak lagi koperatif.

g. Strategi *Soft Majority*

Strategi ini berusaha menghindari pemanfaatan terus menerus, dengan cara merespon tindakan lawan yang cenderung tidak mau bekerjasama, antara lain dengan terang-terangan menolak kerja sama. Langkah ini memiliki keuntungan dengan diteruskannya kerjasama dengan pihak lawan yang siap untuk bekerjasama. Tapi kerugiannya adalah cenderung mudah ditipu, misalnya melalui per nasty.

h. Strategi *Tit For Tat*

Strategi ini adalah salah satu yang mau bekerjasama tetapi bertahan dengan melawan usaha-usaha pemanfaatan yang dilakukan lawan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada saat yang sama, strategi ini tidak bersifat mendendam melainkan menjawab kesediaan bekerjasama kembali jika ada tawaran untuk bekerjasama lagi. Tit For Tat tidak dapat menang karena tidak pernah menolak kerjasama tanpa motivasi dan dengan demikian tidak pernah berusaha mencapai poin yang unggul.

i. Strategi *Mistrust*

Strategi Mistrust menolak kerjasama dalam langkah yang pertama, kemudian mainkan sama halnya dengan strategi tit for tar. Mistrust sama sekali tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena strategi ini sejak awal telah menolak untuk bekerjasama. Oleh karena itu, bergantung pada insiatif lawan untuk memulai kerjasama.

j. Strategi *Prober*

Disini strategi lawan akan diuji terlebih dulu. Jika strategi lawan membiarkan dirinya untuk dimanfaatkan, prober mengambil langkah lebih lanjut untuk menola kerjasama. Langkah ini akan mengarahkan pada suatu sikap dasar yang agresif dan akan berubah menjadi sikap yang kooperatif.

k. Srategi *Pavlov*

Strategi Pavlov bekerja sama hanya dalam langkah pertama, setelah itu hanya apabila kedua pemain mengambil langkah yang sama. Pavlov memiliki dasar pemikiran yang sama seperti tit for tat, tetapi memiliki tuntutan yang lebih tinggi terhadap kesediaan diri sendiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk bekerjasama, jika kerjasama yang telah dilakukan berhasil maka akan dilakukan kerjasama lebih lanjut.

Dari teori di atas bahwasnya teori strategi politik dari pater Schroeder menjelaskan tentang taktik, teknik cara dan kiat yang di kelola untuk politisi unduk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan.

Adapun strategi politik ada beberapa sistematika strategi politik antara lain yakni merumuskan misi, perumusan sasaran, perumusan strategi ada pun rencana setiap caleg pasti berbeda beda. Para caleg tentunya bisa membuat atau merealisasikan teori di atas karna sangat bermanfaat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yakni penelitian yang datanya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik atau bentuk cara-cara lainnya yang mengunakan ukuran angka-angka. Alasan peneliti menggunakan metode penulisan kualitatif dikarenakan dari sifat masalah yang diteliti, dalam penelitian ini berupaya mengunggkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang kompleks. Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan gambaran tentang sejauh mana makna strategi rekrutmen PPP dalam meningkatkan partisipasi perempuan menjadi caleg perempuan pada pemilu 2019 studi kasus DPC PPP Gresik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yakni suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi atau lembaga tertentu. Ditinjau dari wilayahnya hanya meliputi daerah atau subyek yang sangat sempit, sedangkan ditinjau dari sifat penelitian maka lebih mendalam.[26] Peneliti berusaha menuliskan secara deskriptif makna strategi rekrutmen caleg perempuan pada pemilu 2019 studi kasus DPC PPP Gresik Lokasi dan waktu penelitian**.**

Lokasi penelitian ini dilakukan di DPC PPP Kabupaten Gresik. Pertimbangan memilih lokasi penelitian ini antara lain Mayoritas Masyarakat di kota kabupaten Gresik kebanyakan masyarakat muslim, prinsip perjuangan

[26] Suharsimi Arikunto. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Rieka Cipta: Jakarta, 1996), Hal.129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PPP juga sangat berpengaruh di masyarakat Kabupaten Gresik, selaras dengan kondisi keagamaan masyarakat Kabupaten Gresik, PPP saat ini juga termasuk partai islam tertua dan keterwakilan politik perempuan PPP di DPRD Gresik sangat rendah atau kurang belum ada peningkatan di tahun tahun sebelumnya, maka dari itu PPP mengusung 21 calon perempuan agar lebih optimis menang di pemilihan 2019 mendatang.

Kabupaten Gresik ini mempunyai arti yang signifikan dalam hal kegiatan operasional di lapangan kerena Kabupaten Gresik mayoritas masyarakatnya memiliki religiuitas yang tinggi terhadap nilai-nilai agama.[27] Dalam hal ini sejalan dengan prinsip perjuangan politik PPP yang telah termaktub dalam 5 khidmat dan 6 prinsip perjuangan PPP untuk menjalankan nilai-nilai ajaran islam dengan baik. PPP dipilih dari pada partai islam yang lain karena PPP merupakan partai islam tertua yang masih eksis sampai saat ini. PPP menunjukkan dengan prinsip islam yang menjadi asas perjuangan partai seharusnya juga mampu memperjuangkan di jalan politik di legislatif di Kabupaten Gresik. PPP saat ini juga termasuk partai islam yang mendapatkan kursi DPRD perempuan di Kabupaten Gresik. PPP mendapatkan 1 kursi perempuan yang di tepati Lilik Hidayati dari dapil 1 (Kebomas- Gresik) di bandingkan partai PKS yang tidak mendapatkan kursi DPRD laki-laki dan perempuan. Adapun partai islam di Kabupaten Gresik antara lain PPP, PKB

[27] Jumlah Muslim di Gresik 1.147, 746 Jumlah Madrasah di Gresik 237, Badan Pusat Stastistika Kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan PKS hanya PPP dan PKB yang mendapatkan perolehan kursi perempuan di DPRD Gresik saat ini.[28]

Lantas seperti apa strategi rekrutmen caleg perempuan pada pemilu 2019 di Kabupaten Gresik. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sedangkan waktu penelitian ini dijadwalkan kurang lebih 3 bulan, dimulai pada bulan Oktober s/d Desember 2018.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian skripsi ini dilakukan dalam kurun waktu sekitar 3 bulan di mulai pada bulan Oktober s/d Desmber 2018 di kantor DPC PPP Gresik Jl. Kh Abdul Karim no 80 Gresik dalam memilih lokasi ini peneliti memiliki pertimbangan, diantaranya karena memang objek utama yaitu Anggota DPC PPP dan calon anggota legislatif perempuan DPRD Kabupaten Gresik.

C. Pemilihan Informan dan Obyek Penelitian

Dikarenakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, maka besar kecilnya subyek penelitian bukan menjadi prioritas utama dalam upaya penggalian data, namun yang menjadi titik penting adalah kualitas subyek penelitian dalam memberikan data yang jelas dan akurat sesuai dengan kebutuhan.[29]

[28] Berita Gresik.Com jumlah anggota DPRD 2014-2019 Partai PPP, PKB dan PKS
[29] James Spradley, *Metode Etnografi*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1997) Hlm 61-70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Subjek penelitian yang diambil adalah orang yang terlibat atau memiliki pengetahuan yang luas tentang strategi rekrutmen PPP dalam meningkatkan partisipasi perempuan caleg legislatif di Kabupaten Gresik.

Adapun teknik penentuan subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, teknik ini dilakukan berdasarkan penilaian, peneliti akan pengetahuan calon subjek penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penilaian bahwa subjek penelitian tersebut mempunyai pengetahuan dilakukan secara subjektif berdasarkan pengamatan peneliti. Pada umumnya, yang dinilai mampu menjawab pertanyaan penelitian adalah orang yang berpengalaman atau memiliki pengetahuan terkait fokus penelitian. Kriteria subjek penelitian menurut peneliti adalah orang yang memahami visi misi dan konstitusi PPP dan memahami kinerja legislatif di Kabupaten Gresik. Subjek penelitian yang dimaksud adalah anggota PPP DPRD Kabupaten Gresik dan caleg legislatif Kabupaten Gresik. Antara lain yang di wawancara yakni

1. Ketua DPC PPP : Achmad Nadhir
2. Wakil DPC PPP : H. Murtadlo Nur
3. Sekertaris DPC PPP : Khoirul Huda (Caleg)
4. Bendahara DPC PPP : Lilik Hidayati
5. Ketua Pemenangan Pileg : Khorul Huda
6. Staf Pendaftaran Caleg : Ali Mahmudi (Caleg)
7. Caleg DPRD Gresik yang di wawancara :
    a. Lilik Hidayati (DPRD berserta Calon Legislatif)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hj. Menik Maratus Sholiha (Calon Legislatif)

c. Mifathul Jannah (Caleg Legislatif)

Dalam penelitian ini tidak ada aturan yang baku tentang jumlah minimal dari pasrtisipasi. Hanya saja, pengumpulan data diakhiri bila peneliti tidak lagi menemukan informasi baru.[30]

D. Tahap – Tahap Penelitian

1. Tahap Pra Lapangan

Dalam tahap ini, peneliti menggali informasi tentang sikap. PPP di Kabupaten Gresik dalam mengetahui strategi rekrutmen dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan menjadi caleg legislatif di Kabupaten Gresik. Sebagai akses data awal peneliti menggali informasi kepada DPC PPP Kabupaten Gresik, kemudian menyusunnya menjadi latar belakang dan rumusan masalah. Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap pra lapangan ini adalah :

a. Menyusun rancangan penelitian Pada tahap ini peneliti membuat proposal penelitian.

b. Memilih lapangan penelitian, yaitu DPC PPP Kabupaten Gresik.

c. Mengajukan surat permohonan (kesediaan) yang ditujukan kepada DPC PPP Kabupaten Gresik dan pengurus PPP.

[30] Afifuddin Dan Beni Saebani. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012) Hal 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tahap Lapangan

a. Wawancara Mendalam

Dalam tahap ini, peneliti melakukan interview mendalam dengan mencari subjek dan informan yang tepat agar diperoleh data yang maksimal.

b. Pengumpulan Dokumen

Setelah interview dilakukan, peneliti mengumpulkan data yang ada di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan mentracking beberapa informasi yang dibutuhkan. Setelah itu akan dilakukan proses analisis data.

c. Menyusun Laporan

Sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang disusun secara terstruktur dengan bentuk format sesuai prosedur yang berlaku dan dapat di pertanggung jawabkan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dalah pengamatan yang dilakukan terhadap suatu kondisi, keadaan maupun situasi yang berkembang di lapangan. Sasaran observasi penelitian meliputi aktor, tempat, kegiatan, waktu dan peristiwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Wawancara Mendalam *(indepht interview)*

Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan. Dalam wawancara mendalam, peneliti menyusun beberapa pertanyaan pokok sebagai pedoman untuk membuka pertanyaan. Selanjutnya pertanyaan berikutnya didasarkan pada jawaban atas pertanyaan pokok tersebut. Pertanyaan tersebut ditujukan kepada subjek penelitian.[31]

Untuk menunjang wawancara mendalam peneliti menggunakan peralatan lain berupa buku catatan harian mengenai kegiatan penelitian tape *recorder* untuk merekam hasil wawancara. Wawancara dengan masing-masing subjek penelitian dilakukan secara terpisah untuk memperkecil kesempatan subjek penelitian dalam menyamakan jawabannya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang diperoleh untuk menjawab masalah penelitian yang dicari dalam dokumen atau bahan pustaka. Yang maksudnya adalah data dari penelitian ini akan didapat dari dokumen yang berkaitan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, platform partai, pedoman organisasi, pedoman fraksi, laporan

[31] Bagong Suyanto. *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1995), Hal 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanggung jawaban DPC PPP Kabupaten Gresik dan dokumen keputusan.[32]

F. Teknik Analisa Data

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang dijelaskan sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

   Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.[33]

2. *Data Display* (Penyajian Data)

   Penyajian data dimaknai sebagai sekumpulan informasi yang tersusun, yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencemari penyajian data ini, maka akan dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya meneruskan analisis atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti melihat gambaran

[32] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2014) Hal 61.
[33] Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung : Alvabeta, 2014) Hal 247-249

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan bagian-bagian tertentu dari data penelitian, sehingga dari data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan.[34]

3. *Conclusion Drawing/* verification

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Validitas atau keabsahan data merupakan derajad ketepatan antara data yang terjadi pada subyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda anatara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.[35]Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujia kreadibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan

[34] Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Alvabeta, 2009) Hal 90

[35] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* (Bandung: Alfaveta, 2013) Hal 363.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.[36]

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan pada penelitian ini terbagi menjadi lima bab sebagai rancangan berfikir dan mempermudah untuk memaparkan hasil penelitian. Adapun rancangan pembahasan penelitian ini sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

   BAB I : Berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsptual, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

2. BAB II KAJIAN TEORITIK

   BAB II : Berisi kajian teoritik yang menjabarkan kerangka teori Teori Rekrutmen Politik, Teori Representasi Perempuan, Teori Strategi Politik.

3. BAB III METODELOGI PENELITIAN

   BAB III : Berisi metodologi penelitian, menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, pemilihan informan dan obyek penelitian,tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik penentuan informan, teknik analisa data, teknik pemeriksaan keabsaan data dan jadwal penelitian.

[36] Ibid, 372.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. BAB IV DESKRIPSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

   BAB IV : Berisi penyajian dan anlisa data, menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang di peroleh.

5. BAB V PENUTUP

   BAB V : Merupakan Bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

DESKRIPSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN GRESIK

A. DESKRIPSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN GRESIK

1. Sejarah Partai Persatuan Pembangunan

Partai Persatuan Pembagunan, atau biasa disingkat dengan PPP, lahir pada tanggal 5 Januari 1973, yang merupakan hasil fusi dari empat partai politik Islam, yaitu (1) Partai Nadhlatul Ulama, (2) Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi, (3) Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII, dan (4) Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau Perti. Tentunyam fusi ini menjadi simbol kekuatan pokok dari PPP, yaitu partai yang bisa mempersatukan berbagai kelompok dan faksi dalam Islam. Oleh karena itu, wajar saja jikalau PPP sekarang ini menyatakan dirinya sebagai Rumah Besar Umat Islam".[37]

Kelahiran PPP ditandai dengan adanya lima deklarator, yang tediri dari empat orang pimpinan Partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok persatuan pembangunan, yang semacam fraksi empat partai Islam di DPR. Kelima deklarator tersebut yaitu;

a. KH. Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama;
b. H. Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi

[37] Tim Litbang Kompas, partai partai politik Indonesia, (Jakarta PT. Kompas media Nusantara, 1999) Hal 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII
d. Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau Perti.
e. Haji Mayskur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR.

PPP berasaskan Islam dan berlambangkan Ka'bah. Namun dalam perjalanannya, PPP pernah menanggalkan asas Islam tersebut dan selanjutnya menggunakan asas "Negara Pancasila", sesuai dengan sistem politik dan peratururan perundangan yang berlaku saat itu. Tepatnya sejak tahun 1984. Pada Muktamar I PPP pada tahun 1984, secara resmi PPP menggunakan asas Pancasila dengan lambang partai berupa "bintang dalam segi lima". Setelah masa Orde Baru, maka PPP kembali menggunakan asas Islam dan lambang Ka'bah, yang merupakan hasil Muktamar IV pada tahun 1998. Meskipun PPP menjadikan Islam sebagai asas, akan tetapi PPP masih terus berkomitemen untuk mendukung keutuhan NKRI dengan berdasarkan pada Pancasila, sebagaimana dalam Pasal 5 AD PPP hasil Muktamar VII Bandung Tahun 2011, bahwa: Tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah rida Allah Subhanahu Wataala"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketua Umum DPP PPP yang pertama adalah H. Mohammad Syafaat Mintaredja, SH (5 Januari 1973-1978). Saat itu, selain jabatan Ketua Umum juga dikenal presidium partai, yang anggotanya: KH. Idham Chalid sebagai Presiden Partai, H. Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Drs. H. Th. M. Gobel, Haji Rusli Halil dan Haji Masykur, masing-masing sebagai Wakil Presiden. Selanjutnya, Ketua Umum DPP PPP adalah H. Jailani Naro, SH., yang menjabat dua periode (1978-1984 dan 1984-1989). Selanjutnya adalah H. Ismail Hasan Metareum, SH (1989-1994 dan 1994-1998). Berikutny adalah H. Hamzah Haz (Hasil Muktamar IV tahun 1998 dan hasil Muktamar V tahun 2003). Berikutny adalah H. Suryadharma Ali (Hasil Muktamar VI Tahun 2007 dan hasil Muktamar VII 2011)

PPP telah mengikuti PEMILU sebanyak delapan kali sejak tahun 1977 dengan hasil yang turun naik, atau fluktuatif. Gambarannya sebagai berikut:

a. Pada Pemilu Tahun 1977, PPP memperoleh sebanyak 18.745.565 suara (29,29 %) dengan memperoleh kursi sebanyak 99 kursi (27,12%).
b. Pada Pemilu Tahun 1982, PPP memperoleh sebanyak 20.871.800 suara (27,78 %) dengan memperoleh kursi sebanyak 94 kursi (26,11%).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pada Pemilu Tahun 1987, PPP memperoleh sebanyak 13.701.428 suara (15,97 %) dengan memperoleh kursi sebanyak 61 kursi (15,25%).
d. Pada Pemilu Tahun 1992, PPP memperoleh sebanyak 16.624.647 suara (14,59 %) dengan memperoleh kursi sebanyak 62 kursi (15,50%).
e. Pada Pemilu Tahun 1997, PPP memperoleh sebanyak 25.340.018 suara dengan memperoleh kursi sebanyak 89 kursi (20,94 %).
f. Pada Pemilu Tahun 1999, PPP memperoleh sebanyak 11.329.905 suara (10,71 %) dengan memperoleh kursi sebanyak 58 kursi (12,55%).
g. Pada Pemilu Tahun 2004, PPP memperoleh sebanyak 9.248.764 (8,14 %) dengan memperoleh kursi sebanyak 58 kursi (10,54 %).
h. Pada Pemilu Tahun 2009, PPP memperoleh sebanyak 5,5 juta suara (3,2 %) dengan memperoleh kursi sebanyak 38 kursi.

Dengan memperhatikan AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) PPP, pernyataan bahwa PPP merupakan “Rumah Besar Umat Islam” adalah penegasan bahwa PPP merupakan hasil gabungan atau fusi dari beberapa partai politik Islam melalui sebuah deklarasi bersama. Tepatnya pada 5 Januari 1973 atau 30 Dzulqadah 1392 H. dengan demikian, PPP mempunyai kekuatan utama yang terletak pada kemampuan untuk membangun dan menggalang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebersamaan di antara partai politik Islam yang telah fusi ke dalam PPP.

Tidak sedikit yang berpendapat bahwa PPP hanyalah didirikan oleh empat partai politik, yaitu (1) Partai NU (Parta Nahdlatul Ulama), (2) Parmusi (Partai Muslimin Indonesia), (3) PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), dan (4) Perti (Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah). Tentunya ini adalah pendapat atau pandangan yang salah besar, baik secara de jure ataupun de facto. Dikarenakan secara de jure, AD/ART PPP tidak pernah menyebutkan keempat partai Islam tersebut sebagai pendiri PPP. AD/ART hanyalah menyebutkan bahwa PPP adalah hasil gabungan atau fusi empat partai politik. Ini mengandung pengertian bahwa para tokoh yang merumuskan Mukaddimah AD/ART tersebut, dimana sejak dahulu sampai sekarang tidak pernah dirubah secara substansial, menyadari bahwa selain empat partai politik yang telah berfusi tersebut, masih terdapat organisasi Islam yang menjadi pendukung keempat partai politik tersebut yang harus masuk sebagai pendiri dari PPP.

Di samping itu, secara de jure pula, bahwa Khitthah dan Program Perjuangan PPP juga tidak pernah menyebutkan keempat partai Islam tersebut sebagai pendiri PPP. Akan tetapi menyebutkannya sebagai pihak yang mendeklarasikan PPP. Tentunya ini mengandung arti bahwa Khitthah dan Program Perjuangan PPP menjelaskan bahwa pendiri PPP tidaklah hanya terbatas pada deklarator semata, akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi di balik itu masih terdapat organisasi-organisasi Islam yang turut mendukung dekralasi tersebut, sehingga deklarasi tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Juga, secara de jure, Keputusan Presiden No. 70 Tahun 1968 yang mengesahkan pendirian Parmusi juga menegaskan bahwa pendiri partai politik ini adalah 16 organisasi Islam yaitu Muhamamdiyah, Jamiatul Washliyah, Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (GASBIINDO), Persatuan Islam (Persis), Nahdlatul Wathan, Mathlaul Anwar, Serikat Nelayan Islam Indonesia (SNII), Kongres Buruh Islam Merdeka (KBIM), Persatuan Umat Islam (PUI), AlIttihadiyah, Persatuan Organisasi Buruh Islam se Indonesia (PORBISI), Persatuan Guru Agama Islam Republik Indonesia (PGAIRI), Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI), Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Al-Irsyad Al-Islamiyah dan Wanita Islam. Setelah Parmusi bergabung dengan PPP, maka pendiri Parmusi secara otomatis juga merupakan pendiri PPP.

Akan tetapi, dikarenakan mayoritas organisasi Islam pendiri Parmusi tersebut lebih konsentrasi pada berbagai aktifitas sosial kemasyarakatan, sedangkan AD/ART dan Khitthah Program Perjuangan PPP berbicara dalam konteks politik, sehingga wajar saja jikalau yang dinyatakan secara eksplisit hanyalah partai Islam yang sudah diakui keberadaanya sebagai partai politik, yaitu (1) Partai NU, (2) Parmusi, (3) PSII, dan (4) Partai Islam Perti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendeknya, secara de jure deklator PPP adalah 4 partai politik. Akan tetapi pendiri PPP adalah hampir seluruh organisasi Islam yang terdapat di Indonesia, khususnya NU dan Muhammadiyah.

Selain itu secara de facto, klaim bahwa PPP merupakan rumah besar umat Islam akan terwujud jika dua puluh organisasi Islam itu yaitu 4 partai politik yang menjadi deklarator serta 16 organisasi Islam yang menjadi pendukung deklarator memberikan mandate kepada PPP untuk menyalurkan aspirasinya. Begitu pula sebaliknya, jika kedua puluh organisasi Islam itu tidak memberikan dukungan kepada PPP, maka klaim PPP sebagai rumah besar umat Islam hanya pepesan kosong belaka.

Juga, secara de facto, pada saat PPP memperoleh dukungan dari 20 organisasi Islam tersebut, maka PPP telah sukses menorah sejarah, baik dari sisi kualitas ataupun kuantitas. Bersama dengan organisasi-organisasi Islam, PPP menjadi partai politik yang serius dan gigih berjuang guna kepentingan politik umat Islam, dengan berbagai risiko, semisal siksaan, intimidasi dan penahanan. Semuanya tersebut dilakukan oleh aktivis PPP, dikarenakan mereka meyakini bahwa hal tersebut sesuai serta selaras dengan perintah Allah SWT. dan sesuai dengan aspirasi umat Islam dan organasisasi Islam.[38]

[38] H.M Djakfar Shiddiq, *PPP Mengagas Reformasi membangun Indonesia baru* , Jakarta 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Platform PPP

Dengan memperhatikan sejarah perjuangan PPP serta jati dirinya, maka visi PPP adalah -Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman".

Platform PPP dalam bidang agama berkisar tentang pentingnya penataan kehidupan masyarakat yang Islami serta berakhlaqul karimah dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar; Pentingnya peran agama (dalam hal ini adalah Islam) sebagai panduan moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan kenegaraan; Paradigma hubungan antara Islam dan negara yang bersifat simbiotik, sinergis serta saling membutuhkan dan memelihara, yang berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas Islam dan lokalitas keindonesiaan, dan Komitmen pada prinsip dan sikap toleransi antar umat beragama.

Sedangkan dalam bidang politik, PPP berkomitmen meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam aspek penguatan kelembagaan, mekanisme dan budaya politik yang demokratis dan berakhlaqul karimah. PPP menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), menghargai kebebasan berekspresi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat dan berorganisasi, terwujudnya good and clean goverment, dan upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Platform ekonomi PPP mempertegas keberpihakannya pada konsep dan sistem ekonomi kerakyatan, terwujudnya keadilan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, penguasaan negara terhadap cabang-cabang ekonomi yang menguasai hidup orang banyak, maksimalisasi peran BUMN dan BUMD, dan mendorong peningkatan keswadayaan nasional (unit usaha keluarga/individual, usaha swasta, badan usaha negara dan koperasi) demi terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat dan bangsa Indonesia.

PPP berkomitmen pada upaya tegaknya supremasi hukum, penegakan HAM, terwujudnya tradisi kepatuhan hukum dan tradisi berkonstitusi, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, pembaruan hukum nasional, terciptanya tertib sipil dan rasa aman masyarakat, penguatan institusi dan instrumen penegak hukum, serta penguatan moralitas penegak hukum.

PPP berjuang demi terwujudnya kehidupan sosial yang religius dan bermoral, toleran dan menjunjung tinggi persatuan, taat hukum dan tertib sipil, kritis dan kreatif, mandiri, menghilangkan budaya kekerasan, terpenuhinya rasa aman masyarakat, mencegah segala

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upaya marjinalisasi dan kolonisasi budaya lokal baik atas nama agama maupun modernitas dan pembangunan, mengembangkan nilai-nilai sosial budaya yang bersumber pada ajaran etik, moral dan spiritual agama, serta mengembangkan seni budaya tradisional dan daerah yang memperkaya seni budaya nasional yang didalamnya dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan.

PPP berkomitmen pada terwujudnya manusia Indonesia yang berkualitas yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta kualitas kesehatan yang baik. Program pembangunan kesejahteraan hendaknya diarahkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial yang adil dan merata serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

PPP bertekad menjadikan bidang pendidikan sebagai prioritas dan titik tolak pembangunan kesejahtaraan, yang darinya diharapkan lahir manusia Indonesia yang cerdas, trampil, mandiri dan berdaya saing tinggi.

Visi politik luar negeri PPP diorientasikan pada upaya mengembangkan politik luar negeri yang bebas dan aktif, dalam arti bahwa Indonesia ikut aktif memajukan perdamaian dunia dan menentang segala bentuk penjajahan, menolak ketergantungan terhadap pihak luar manapun yang dapat mengurangi kedaulatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia, memelihara persahabatan antara negara Republik Indonesia dengan negara-negara lain atas dasar saling menghormati dan kerjasama menuju terwujudnya perdamaian dunia yang adil, beradab dan dengan prinsip keseimbangan.

Sedangkan misi PPP (Khidmat Perjuangan) diantaranya: PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim). Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme/ marxisme/leninisme, serta sekularisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia.

PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama manusia). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neofeodalisme, faham-faham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan.

PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan mengembangkan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang ber-bhineka tunggal mika.

PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang wenangan yang mendzalimi rakyat.

PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridlai oleh Allah SWT, baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.[39]

3. Sejarah Perkembangan Partai Persatuan Pembangunan Gresik

Lahirnya DPC PPP Gresik yaitu 5 Januari 1973 peringatan tersebut di samakan dengan semua DPC yang ada di Indonesia. Sejarah

[39] Ketetapan Muktamar VI PPP, tentang Khittah dan program perjuangan PPP, Jakarta 2007. Hal 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkembangan PPP di Gresik mengalami pasang surut di mana PPP Gresik pernah mengali adanya pemerosotan di bangku legislatif Gresik. pada tahun 1999 hanya 2 yang terpilih di kursi legislatif Gresik dan di tahun tahun berikutnya PPP cukup mengalami peningkatan untuk kursi legislatif di tahun 2014 sampai sekarang pun PPP cukup mempunyai penigkatan yang cukup baik. Sekarang kursi legislatif di tempai 7 anggota legislatif.

Tetapi di tahun 2010 PPP juga pernah mengalami adanya kekalahan di pemilihan bupat. Sekarang PPP lebih semangat untuk memenangkan pemilihan legislatif di tahun 2019 agar PPP bisa maju lagi di pemilihan bupati di tahun 2020 mendatang. PPP sangat optimis untuk bisa mendapatkan kursi lebih banyak di banding priode kemarin karna celeng yang sekarang di calonkan mempunyai pengalaman dan pantas untuk menjadi legislatif.

Struktur organisasi DPC PPP Gresik enam tahun sekali mengalami pergantian dari pengurus PAC sampai ke Ranting mengalami pergantian.

4. Program DPC PPP Gresik

Tujuan, Asas dan Usaha-usaha PPP

a. Tujuan : membentuk masyarakat madani, adil dan sejahtera dalam wadah negara kesatuan republic indonesia (NKRI) yang di ridhoi allah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Asas : Islam. Asas ini sesuai dengan amanat partai partai islam yang memfusikan kegiatan politiknya pada tanggal 3 januari 1973, yaitu Partai Nahdotul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Persatuan Tarbiyah Indonesia (Perti).

c. Usaha- usaha PPP Untuk mencapai tujuan di atas, menurut AD pasal 4A, PPP melakukan usaha usaha konsitusional (sesuai peraturan perundangan) yaitu:

1) Melakukan ajaran islam dalam hidup perorangan, bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
2) Mendorong tercapainya iklim yang sebaik baiknya bagi terlaksannanya kegiatan kegiatan peribadatan menurut islam.
3) Memupuk ukhwa Islamiyah, ukhwa wathoniyah dan ukhwa basyariyah untuk mengukuhkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dalam segala kegiatan kemasyarakatan dan kenegaraan.
4) Menegakkan membangun dan mempertahankan NKRI
5) Memperluas dan memperdalam pengetahuaan rakyat supaya lebih sadar akan hak dan kewajibannya selaku warga negara dari negara hukum yang merdeka, berdaulat, demokrasi dan mengormati HAM.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Menggairakan partisipasi seluruh rakyat dalam pembangunan negara dan mengusahakan adanya keseimbangan antara pembangunan rohani dan jasmani.
7) Mengadakan kerja sama dengan partai-partai politik dan golongan masyarakat lainya untuk mencapai tujuan bersama atas dasar toleransi dan hargamengargai.
8) Memberantas faham komunisme/atheism dan faham faham lainya yang bertentangan dengan islam dan Pancasila.
9) Turut memelihara persahabatan antara republic Indonesia dengan negara negara atas dasar hormat mengormati dan kerja sama menuju terwujudnya perdamaian dunia yang adil dan beradab.

Melaksanakan usaha usaha lainya yang tidak bertentangan dengan azaz dan tujuan. Untuk mewujudkan usaha usaha di atas, PPP membuat ketetapan program Perjuangan yang di putuskan dalam muktamar, muswil, muscab, musancab, musran.

d. Visi, Misi dan Program Perjuangan/ Program Kerja DPC PPP

Visi DPC PPP Kab. Gresik, adalah : Masyarakat Gresik yang sejahtera. Misi DPC PPP Kab Gresik adalah : Nilai nilai Syariat berjalan di Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perwujudan Misi:

1) PPP berperan aktif dalam:
    a) Perencanaan dan penyusunan kebijakan daerah (peraturan daerah dan lainya)
    b) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
    c) Pengawasan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.
    d) Menyerap dan memperjuangkan kepentingan masyarakat gresik.
2) Fraksi PPP DPRD Gresik sebagai Social Engenering. Agar FPPP dapat berperan maksimal dengan kekuatan yang di perhitungkan maka DPC PPP agar mampu mengerakan seluruh potensi yang ada untuk merebut 11 kursi di DPRD Gresik pada pileg 2019 akan datang.
3) PPP sebagai pemimpin daerah (Bupati-wakil bupati). Pada pemilukada 2020 mendatang. Dan di tahun lalu tepatnya di tahun 2010 ppp telah tampil sebagai calon wakil bupati yang menang dalam pilihan rakyat tapi di kalahkan oleh MA. Jika PPP ingin mendapatkan harga maka DPC harus menyiapkan calon untuk merebut kursi bupati Gresik 2020 mendatang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cara mewujudkan Misi:

a) Membangun Insitusi PPP sebagai partai politik.
b) Membangun fraksi dan personalitasnya sebagai kepanjangan tangan dan ujung tombak perjuangan partai.
c) Program perjuangan DPC PPP Kab Gresik berpedoman pada Tab Muktamar IV Nomer 04/TAP/Muktamar VI/PPP/I/2014 tentang Khitmah dan program Perjuangan PPP. Di DPC Kab. Gresik, PH DPC wajib membuat rencana detail program perjuangan di sesuaian sengan kebutuhan dan ketersediaan SDM0SDA beserta dananya. Program perjuanganya/kerja PH DPC telah tersususn pada bagian lainya berikutnya.[40]

5. Komposisi Pengurus DPC PPP Gresik

Durasi waktu (periodesasi) kepengurusan DPC PPP Gresik diperbaharui secara rutin selama lima tahun sekali. Berikut susunan dan personalia Pengurus Harian DPC PPP Gresik masa bakti 2016-2021.

Susunan Pengurus DPC PPP Gresik Periode 2016-2020

Ketua	**: H. Achmad Nadir**
Wakil Ketua Bid. Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi	: H. Murtadlo Nur, SH
Wakil Ketua Bid. Agama dan Dakwah Pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh wakaf	: Zainul Arifin, S.Ag

[40] Ketetapan muktamar VI PPP Tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga , Jakarta 2007 hal 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakil Ketua Bid. Hubungan Kerjasama Antar Lembaga	: Su'id
Wakil Ketua Bid. Advokasi Hukum Dan Ham	: Akhmad Syafa', SH
Wakil Ketua Bid. Teknologi, Informasi Media dan Komunikasi	: H. Hilaludin
Wakil Ketua lingkungan Hidup dan Penangulanggan Bencana Alam	: Indah Ning Nuranisa
Wakil Ketua Bid. Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak	: Dra. Hj. Hatimmah
Wakil Ketua Bid. Ekonomi, Penembangan Koperasi dan Kewirausahaan	: H. Saiful Huda
Wakil Ketua Bid. Pendidikan, seni budaya Dan Pariwisata	: Drs. Imam Sya'roni
Wakil Ketua Bid. Pemudan dan Olahraga	: H. Syafiqi M.Zain
Wakil Ketua Bid. Pemenangan dapil I	: Marwan, S.Pd.I
Wakil Ketua Bid. Pemenangan dapil II	: H. Asyari, S.Ag,MM
Wakil Ketua Bid. Pemenangan dapil III	: H. Sumardi, Ba
Wakil Ketua Bid. Pemenangan dapil IV	: Mustaqim, S,Pd.I
Wakil Ketua Bid. Pemenangan dapil V	: H. Muntarifi, SE
Wakil Ketua Bid. Pemenangan dapil VI	: H. Ahmad Khusnairi
Wakil Ketua Bid. Pemenangan dapil VII	: Misbahusudur
Sekertaris	**: Khorul Huda,S.Ag**
Wakil Sekertaris Bid. Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi	: Syaifuddin, S.Pd.I
Wakil Sekertaris Bid. Agama dan Dakwah Pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh wakaf	: Muslicin Ustman
Wakil Sekertaris Bid. Hubungan Kerjasama Antar Lembaga	: Siti Aisyah, S.Pd.I

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakil Sekertaris Bid. Advokasi Hukum
Dan Ham : HJ. Khoiroh, SH
Wakil Sekertaris Bid. Teknologi, Informasi
Media dan Komunikasi : M. Kurdi, S.H.I
Wakil Sekertaris lingkungan Hidup dan
Penangulanggan Bencana Alam : Hj. Sriwahyni, S.Pd
Wakil Sekertaris Bid. Pemberdayaan
perempuan Dan Perlindungan Anak : Sofiyah, S.Fd
Wakil Sekertaris Bid. Ekonomi, Penembangan
Koperasi dan Kewirausahaan : Anisatul Ummah
Wakil Sekertaris Bid. Pendidikan, seni budaya
Dan Pariwisata : H. Zubaidi
Wakil Sekertaris Bid. Pemudan
dan Olahraga : Tuti'il Qomariyah
Wakil Sekertaris Bid. Pemenangan dapil I : Nur Hidayah
Wakil Sekertaris Bid. Pemenangan dapil II : Yunus
Wakil Sekertaris Bid. Pemenangan dapil III : Hj. Nuriyah
Wakil Sekertaris Bid. Pemenangan dapil IV : M. Munir, S.Ag
Wakil Sekertaris Bid. Pemenangan dapil V : Syaiful Ulum, SE
Wakil Sekertaris Bid. Pemenangan dapil VI: Izzatun Nisa, S.Pd.I
Wakil Sekertaris Bid. Pemenangan dapil VII : Drs.Abdul Basid
Bendahara : H. M. Abdullah
Wakil Bendahara : Hj. Lilik Hidayati
Wakil Bendahara : Roziqus Zahir[41]

[41] Surat Keputusan PPP *"Susunan dan Personalia Pengurus Harian DPC PPP Kab Gresik masa bakti 2016-2021"*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Partai Persatuan Pembangunan dalam Konstalasi Politik Gresik

PPP merupakan salah satu partai tertua pada saat ini. PPP lahir pada tanggal 5 Januari 1973, yangmerupakan hasil fusi dari empat partai politik islam yaitu Partai Nahdatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi, Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau Perti.tentunya fusi ini merupakan symbol kekuatan pokok dari PPP yaitu partai yang bisa mempersatukan berbagai kelompok dan faksi dalam islam.

PPP tentunya juga partai tertua di daerah Gresik karena itu partai PPP optimis bisa menjadi partai nomer satu di Gresik. Tabel di bawah ini menjelasakan perolehan suara pemilu di tahun 2014 di Gresik dan partai PPP merupakan urutan yang ke 3.

Tabel 4.1.

Perolehan Suara atau Kursi Pemilu 2014 di Gresik

No	Partai Politik	DPR	DPRD PROV	DPRD GRESIK	
				SUARA	KURSI
1	Partai Nasdem	31.133	22.468	30.347	1
2	Partai Kebangkitan Bangsa	134.440	141.993	124.200	8
3	Partai Keadilan Sejahtera	15.117	20.088	22.112	0
4	PDI Perjuangan	58.763	59.382	72.168	6
5	Partai Golongan Karya	144.763	74.175	149.320	11
6	Partai Gerindra	63.425	57.936	76.539	6
7	Partai Demokrat	32.849	51.062	57.173	6
8	Partai Amanat Nasional	30.627	41.083	49.535	5
9	Partai Persatuan Pembangunan	61.170	43.706	64.128	7
10	Partai Hanura	11.185	11.789	19.828	0
11	Partai Bulan Bintang	3.495	3.076	3.113	0
12.	PKP Indonesia	6.332	8.568	7.898	0
Jumlah		593.299	535.326	676.361	50

Sumber: KPU Gresik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tabel di atas menjelasakan bahwasanya perolehan kursi DPRD di kabupaten Gresik. Di sini PPP mendapatkan 7 kursi di DPRD Gresik. PPP mendapatkan urutan ke 3 dari perolehan kursi terbanyak di DPRD Gresik saat ini. dan di tahun 2019-2024 PPP mentargetkan lebih dari 7 kursi untuk bisa menjadikan PPP untuk maju ke Gresik 1 atau melaju ke pencalonan bupati mendatang.

Hasil Pilkada Terakhir Gresik

Hasil pilkada Kabupaten Gresik yakni di tahun 2015. Kabupaten Gresik mengusung tiga pasangan calon bupati yakni dari incamben yakni Sambari Halim dan Mohammad Qosim dari paslon satu. Paslon dua di duduki Khusnul Huluq dan Ahmad Rubaei. Dan dari pasangan nomer tiga Nurhamim dan Junaidi. Dari pasangan calon tersebut pastinya taerdapat partai politik pengung yang siap mendukung untuk kemenangan pasangan bupati tersebut. Dari pasangan nomer urut satu terdapat partai PKB, dan Demokrat. Untuk pasangan nomer urut dua di usung oleh partai PDI-P, PAN, PPP dan Partai Gerakan Indonesia Raya. Dan yang terakir dari pasangan nomer urut tiga di usung oleh Partai Golongan Karya. Dan penentuan terakir dari KPUD Gresik dari paslon satu yang memenangkan hasil akhir dengan jumlah 70.64% sedangkan dari paslon dua mendapatkan perolehan 27.68% dan paslon ke tiga mendapatkan 1.68%. di sini partai pengusung menyadari adanya kurang maksimal untuk mendukung para paslon yang di usung maisng masing partai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. STRATEGI REKRUTMEN CALEG PEREMPUAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Sebagai salah satu peserta pemilu legislatif 2019 PPP di Kota Gresik melakukan rekruitmen caleg baik perempuan maupun caleg laki laki. Sebuah tanggung jawab dari DPC PPP Kota Gresik untuk melaksanakan rekruitmen bakal caleg yang berasal dari internal PPP. Kader – kader PPP baik laki laki maupun perempuan yang menonjol menjadi prioritas bagi pengurus harian dan LP2 (Lazna Pemenangan Pemilu) selaku panitia rekruitmen untuk mengusung para kader tersebut menjadi caleg. Tentu semua itu tergantung pada kadernya bersedia diusung atau tidak sehingga PPP sendiri tidak melanggar hak asasi dari kader tersebut.

Di lain kesempatan peneliti juga melakukan wawancara dengan Sekretaris DPC PPP Gresik terkait Strategi partai PPP untuk bisa mendapatkn kursi lebih banyak.

> "Yang pertama harus di pahami sistem pemilu, dan system pemilu sekarang terbuka siapapun bisa di rekrut menjadi anggota legislatif maka strategi yang di lakukan oleh PPP yakni mencari figur figur yang bisa di lihat dari masyarakat layak di jual di masyarakat mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat, supaya masyarakat apa yang menjadi program PPP itu bisa berjalan maka calon anggota legislatif tidak boleh ada yang mantan napi. Dan tak kala dengan caleg lainya di sini caleg perempuan juga sangat unggul dan mempunyai intregritas tinggi, di sini saya sebagai ketua LP2 kita memasang calon-calon perempuan yang sudah mempunyai intrigritas mereka punya pengalaman atau pun jadi tokoh-tokoh masyarakat, seperti ketua muslimat, ada pengurus muslimat ada bahkan ada yang milenial. Meskipun dia gak pengalaman tapi ini anak muda kenapa kita pasang anak muda? Misalnya kayak caleg Balopanggang ini kan milenial usianya masih 21 an sampai 25 an, kenapa ppp memasang kader milenial agar tidak ada kesan partai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> orang tua dulu orang melihat hala ppp partai wong tuwo sekarang tidak sekarang anak mudah harus sudah tampil apakah nantik berhasil? Itu urusan nantik tetapi kita butuh kaderisasi 2019 gagal bisa 2024 itu kan sepenting ada pengalaman sehingga harapan saya itu yang milineal ngak berputus asa ketika tidak jadi tetapi ini sebagai cambuk buat pengalaman.[42]

Dari wawancara di atas bahwasanya PPP juga mempunyai strategi khusus agar bisa menarik para caleg caleg baru khususnya caleg perempuan yang layak untuk di konteskan di pemilihan legislatif bukan dari kader yang hanya mempunyai figur tokoh masyarakat seperti muslimat tetapi dari kalangan anak muda juga ada yang di calonkan oleh DPC PPP agar bisa menjadi kader milenial yang berintregritas tinggi. Tidak hanya itu saja menurut ketua LP2 semua kader perempuan agar bisa menyakinkan bahwasanya pantas untuk di calonkan dan di pilih maka dari itu dari pemikiran teori dari Pater Schroeder mengenai ilmu tentang teknik, taktik, cara, kiat yang dikelola oleh politisi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, merumuskan dan melaksanakan keputusan politik sesuai yang dinginkan wajib kita manfaatkan untuk bagaimana taktik kita bisa mendapatkan kursi perempuan lebih banyak lagi.

1. Membentuk Laznah Pemenangan Pemilu (LP2)

Di partai PPP terdapat sebuah lembaga khusus untuk menangani proses awal pendaftaran sampai pemenangan pemililihan legislatif yang di namakan pengurus LP2 (Lajnah Pemenangan Pemilu). LP2 selaku panitia rekruitmen untuk mengusung para kader tersebut

[42] Wawancara dengan Sekretaris DPC PPP Gresik Khoirul Huda, di kediaman Suci, Manyar, Gresik, 12 Desember 2018, jam 17.00 wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi caleg. Tujuan di bentuknya pengurus LP2 agar setiap caleg yang di calonkan memang benar benar berkompoten dan pantas di majukan menjadi caleg legislatif.

Program LP2 yakni pendaftar Calon Sementara yang selanjutnya disebut DCS dan susunan nama-nama yang dibuat LP2 sesuai tingkatannya untuk disampaikan kepada LPC, berwenang menyusun daftar caleg tetap (DCT) sesuai tingkatannya, Anggota LP2 terdiri dari pengurus inti dan pengurus harian sesuai tingkatannya yang dinilai mampu melakukan tugas dan tanggungjawab persiapan pemilu.

Tabel 4.2

Daftar Nama Pengurus LP2

Nama	Jabatan
H. Choirul Huda	Ketua LP2
H. Murtadlo Nur SH	Wakil LP2
Hj. Lilik Hidayati	Bendahara

Sumber: DPC PPP Gresik

Dari tabel di atas bahwasanya nama nama yang menjadi pengurus inti mempunyai tanggung jawab tinggi untuk bisa mengordinir para anggota caleg lain agar lebih semangat dan lebih yakin kalau PPP pantas mendapatkan kursi lebih banyak.

2. Sosialisasi Pendaftaran Caleg

a. Cara Sosialisasi

Terdapat cara atau strategi sosialisasi yang di gunakan untuk mencari kader kader yang layak untuk di kontestasikan. DPC sebelumnya sudah menyerahkan tangung jawab di setiap PAC per

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecamatan untuk mencari kader kader yang cocok untuk maju ke pencalonan legislatif entah dari kalangan perempuan atau laki- laki semua sudah di serahkan ke PAC masing masing.

DPC sendiri membat banner di setap kecamatan guna membuka secara umum pendaftaran caleg, di samping itu secara struktur memberikan intruksi kepada PAC untuk menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat dengan tokoh partai di wilayahnya masing-masing.

Di lain kesempatan peneliti juga melakukan wawancara terkait cara sosialisasi DPC dan pendaftaran caleg legislatif PPP Gresik

> "Disini kami pengurus DPC mensosialisasikan terkait pendaftaran caleg dengan adanya banner di setiap kecamatan itu sudah sangat membantu mengumumkan pendaftaran caleg dengan di tambahkan lagi adanya pengurus PAC yang sangat semangat mencari kader kader yang pastinya cocok untuk di pentaskan menjadi caleg 2019 dan mempunyai figur yang baik."[43]

Wawancara di atas menjelaskan bahwasanya DPC sudah memberikan tugas kepada PAC masing masing kecamatan guna mencari figur yang cocok untuk di kontestasikan di pemilihan legislatif 2019.

b. Tempat dan Waktu Pendaftaran

Setiap PAC masing masing mempunyai formulir pendaftaran yang langsung di berikan oleh DPC. Semua caleg yang ingin mendaftar bisa melalui kantor DPC atau PAC di wilayah masing masing. Pendaftaran

[43] Wawancara dengan Ali Mahmudi, di kediaman Menganti, Gresik, 10 Desember 2018, jam 17.00 wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak di pungut biaya melainkan harus mempunyai kartu anggota partai dan beragama islam. Waktu pendaftaran kapan saja bisa di lakukan caleg asal tidak melebihi batas akhir yang di berikan oleh DPC atau KPU Gresik. Pendaftaran di mulai pada tanggal 4 – 17 Juli 2019.

c. Syarat Pendaftaran Caleg Partai Persatuan Pembangunan

Terdapat persyaratan yang harus di laksanakan setiap caleg perempuan maupun laki laki

LAJNAH PEMENANGAN PEMILU

a. Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
   1) Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
   2) Bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
   3) Bertempat tinggal di wilayah negara kesatuan republik indonesia;
   4) Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa indonesia;
   5) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Setia kepada pancasila, undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, negara kesatuan republik indonesia, dan bhinneka tunggal ika;
7) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
8) Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
9) Terdaftar sebagai pemilih;
10) Bersedia bekerja penuh waktu;
11) Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara republik indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
12) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

13) Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
14) Menjadi anggota partai politik peserta pemilu;
15) Dicalonkan hanya di i (satu) lembaga perwakilan dan
16) Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

b. Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

1) Kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
2) Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
3) Surat pernyataan bermaterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;

4) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
5) Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
6) Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
7) Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
8) Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
9) Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10) Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh I (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwalkilan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup; dan
11) Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada I (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.[44]

Dari paparan di atas bahwasanya setiap caleg harus memenuhi persyaratan di atas agar bisa terdaftar menjadi caleg tetap anggota legislatif mendatang.

Di lain kesempatan peneliti juga melakukan wawancara dengan Sekretaris DPC PPP Gresik dan ketua LP2 Gresik terkait rekrutmen caleg perempuan.

> "Kita kan punya pengurus mulai dari tingakt Dpc, Pac sampai ranting struktur ini berkewajiban bagaimana mengajak masyrakat untuk mau masuk ke PPP, dengan mekanisme yang ada dan mekanismenya seperti ketika masyarakat mau membuat kartu anggota kita langsung membuatkan selanjutnya kita menawarkan program program partai kedepan itu seperti apa, sehingga masyarakat bisa menilai dan mekanisme antara caleg perempuan dan caleg laki laki sama aja kita tidak membedakan adanya mekanisme atau yang lainya."[45]

Dari wawancara di atas bahwasanya DPC sudah membagi tugasnya ke PAC sampai ke ranting, dari situlah setiap PAC dan ranting mencari kandidat yang cocok untuk di calonkan mencari yang terbaik

[44] Form pengurus LP2 DPC PPP Kabupaten Gresik
[45] Wawancara dengan Khoirul Huda, di kediaman Suci, Manyar, Gresik, 12 Desember 2018, jam 17.00 wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan bisa menerapkan program program DPC PPP ke masyarakat, tak kalah penting DPC tidak membedakan adanya mekanisme yang ada semua caleg perempuan ataupun laki laki semua di samakan entah melalui mekanisme atau yang lainya.

d. Nama Caleg yang Mendaftar

Dan adapun di bawah nama nama pendaftar anggota legislatif 2019 yang sudah di setujui oleh KPU Gresik sebagai berikut :

Tabel 4.3.

Pendaftaran Calon Anggota Legislatif 2019 di DPC PPP Gresik

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Posisi yang di tuju	Daerah atau Dapil
1	Hj.Lilik hidayati, Se,MM	Gresik	12-97-1963	P	DPRD	Gresik I
2	Nur azizah febrianti	Gresik	28-02-1982	P	DPRD	Gresik I
3	Siti munawaroh	Gresik	17-04-1976	P	DPRD	Gresik I
4	Mohammad hasan	Gresik	07-05-1973	L	DPRD	Gresik I
5	Maksum Spd	Jombang	11-04-1958	L	DPRD	Gresik I
6	Zainal abiding	Gresik	04-03-1968	L	DPRD	Gresik I
7	Abdul Wahab	Gresik	16-10-1973	L	DPRD	Gresik I
8	Rojikhussyahir	Gresik	20-01-1983	L	DPRD	Gresik II
9	Mukaukabah Alwadlo	Gresik	24-04-1997	P	DPRD	Gresik II
10	Lutfi syarifuddin	Gresik	26-06-1985	L	DPRD	Gresik II
11	Choiroh SH	Gresik	04-04-1961	P	DPRD	Gresik II
12	Abdul basyid	Gresik	04-06-1977	L	DPRD	Gresik II
13	Ali mahmudi	Gresik	06-03-1975	L	DPRD	Gresik III
14	Muhammad yunus	Gresik	13-07-1974	L	DPRD	Gresik III
15	Dewi ayumi	Gresik	31-07-1970	P	DPRD	Gresik III

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

16	Laode maulidin aziz	Gresik	04-06-1970	L	DPRD	Gresik III
17	Lailatul munawaroh	Gresik	31-01-1987	P	DPRD	Gresik III
18	Siti mualifah	Gresik	10-12-1980	P	DPRD	Gresik III
19	Budi lestari	Pati	21-09-1975	P	DPRD	Gresik III
20	H. sumardi	Gresik	15-08-1961	L	DPRD	Gresik IV
21	Abdul aziz	Gresik	11-02-1965	L	DPRD	Gresik IV
22	Vita putriastuti	Gresik	12-01-1982	P	DPRD	Gresik IV
23	Ning ayu dyah pamungkas	Gresik	25-05-1995	P	DPRD	Gresik IV
24	Faisol	Gresik	18-07-1986	L	DPRD	Gresik IV
25	Moh tamami alislah	Gresik	27-02-1989	L	DPRD	Gresik IV
26	Vivin novalia	Gresik	16-09-1982	P	DPRD	Gresik IV
27	Mustaqim	Gresik	16-12-1960	L	DPRD	Gresik V
28	Miftahul janah	Gresik	01-11-1993	P	DPRD	Gresik V
29	Sriono	Gresik	07-12-1974	L	DPRD	Gresik V
30	Nurjanah	Lamongan	19-07-1994	P	DPRD	Gresik V
31	Winadi	Gresik	02-12-1970	L	DPRD	Gresik V
32	Esfar	Gresik	12-01-1975	L	DPRD	Gresik VI
33	Mardino	Yogyakarta	25-01-1966	L	DPRD	Gresik VI
34	Misnamah	Gresik	27-04-1987	L	DPRD	Gresik VI
35	Lies farhatin	Gresik	22-04-1976	P	DPRD	Gresik VI
36	H. Anwar sadad	Gresik	09-04-1957	L	DPRD	Gresik VII
37	Izzatun nisa	Gresik	10-12-1984	P	DPRD	Gresik VII
38	Rezza kassih pratama	Gresik	14-02-1995	L	DPRD	Gresik VII
39	Lutfiatul husna	Gresik	25-09-1976	P	DPRD	Gresik VII
40	Mohammad zaenal abiding	Gresik	09-01-1981	L	DPRD	Gresik VII
41	Ihwanudin	Gresik	06-06-1978	L	DPRD	Gresik VII
42	Khoirul huda	Gresik	05-06-1976	L	DPRD	Gresik VIII

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

43	Suparno	Gresik	23-12-1975	L	DPRD	Gresik VIII
44	Hj. Menik maratus sholiha	Surabaya	31-08-1960	P	DPRD	Gresik VIII
45	H. Muhammad Nukman	Gresik	27-01-1971	L	DPRD	Gresik VIII
46	Muhammad Kholili	Gresik	08-04-1978	L	DPRD	Gresik VIII
47	Nisfi romadhon	Tuban	07-07-1982	P	DPRD	Gresik VIII
48	Anida norma mujahida	Gresik	28-09-1996	P	DPRD	Gresik VIII
49	Abd hasib	Gresik	5-10-1975	L	DPRD	Gresik VIII
50	Nasihudin	Gresik	30-10-1967	L	DPRD	Gresik VIII

Sumber : DPC PPP Gresik (2018)

Dari tabel berikut bahwasanya nama nama bacaleg anggota DPRD 2019-2024 DPC Gresik sudah memenuhi persyaratan bahwasanya semua bacaleg lolos dan bisa mengikuti tahap selanjutnya yang akan di umumkan oleh pihak KPU Gresik.[46]

3. Penentuan Nomer Urut dan Dapil Caleg

a. Penentuan Nomer Urut

Dan berikut ini adalah Scor angka penentuan nomer urut menurut DPC PPP Gresik.

Tabel 4.4.

Score Angka Penetapan Nomor Urut Caleg PPP Kab. Gresik

Pemilu 2019

1	Ketua DPC	100
2	Sekertaris DPC	90
3	Bendahara DPC	80
4	Pengurus harian DPC (Wakil Ketua, Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara)	70
5	Ketua majelis DPC	70

[46] Dokumen DPC PPP Gesik, penetapan caleg 2019-2024.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6	Sekertaris majelis DPC	60
7	Anggota Majelis DPC	50
8	Ketua fraksi	70
9	Anggota fraksi	60
10	Ketua LP2	70
11	Anggota LP2	60
12	Ketua PC WPP	70
13	Sekertaris PC WPP	60
14	Bendahara PC WPP	50
15	Ketua PAC	70
16	Sekertaris PAC	60
17	Bendahara PAC	50
18	Pengurus harian PAC (Wakil Ketua, Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara)	40
19	Tokoh external (nu, muhamadiyah, gp. Anshor dll)	50

Sumber: DPC PPP Gresik

Dari tabel di atas bahwasanya scor angka penentu nomer urut yang sudah di sah kan oleh anggota DPC PPP Gresik. Bahwasanya tidak ada caleg yang mungkin curiga adanya ketidak adilan yang di lakukan DPC kepada para caleg.

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap caleg mengenai penentuan nomer urut caleg.

> "Ya kalo kayak gitu menurut saya ya nomer urut itu gak penting ya nantik kan kita pengenalan nya ke masyarakat meskipun kita nomer urut 5 tapi kalo di masyarat di percaya kan nantik di inget inget jadi saya gak masalah sih"[47]

Menurut caleg tersebut bahwasanya nomer urut tidak di permasalahkan di pemilihan legislatif yang lebih pentingnya hanya bagaimana caleg bisa terjun langsung dan di nilai masyarakat.

[47] Wawancara dengan Miftahul Jannah, di kediaman Balongpanggang, Gresik, 29 November 2018, jam 09.00 wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hasil Scoring Caleg Partai Persatuan Pembangunan

Tabel 4.5.

Hasil Scoring Caleg DPRD Gresik Dari Partai Persatuan Pembanguna

No	Nama	DPC							PAC				PC WPP			
		KETUA	SEKRT	BEND	PH	MAJELIS	FRAKSI	LP2	KETUA	SEKRT	BEND	PH	KETUA	PH	TOKOH EKSTERNAL	JUMLAH SKORE
1	Lilik hidayati	0	0	0	70	0	70	60	0	0	0	0	0	0	0	200
2	Gus wahab	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
3	Nur azizah febrianti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
4	Jamal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
5	Siti munawaroh	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
6	H. Hasan	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50
7	Zainal abiding	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	60
8	Rojikhus syahir	0	0	0	70	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	130
9	Imam muzayin/ lutfi	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	70
10	Abdul basyid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
11	Hj. Choiroh	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70
12	Mukaukabah alwadlo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
13	Ali mahmudi	0	0	0	70	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	130
14	M Yunus	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	70
15	Santoso	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	60
16	Laode maulidin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50
17	Budi lestari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
18	Dewi ayumi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
19	Siti mualifah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
20	H. Sumardi	0	0	0	70	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	130
21	Abdul jalik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
22	Syamsul	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

23	Faisol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
24	Munthoyibah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
25	Vivi novalia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
26	Vita purtiastusti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
27	H. Mustaqim	0	0	0	70	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	160
28	Winadi	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	70
29	Sriyono	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50
30	Nur Jannah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
31	Miftahul Jannah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
32	Esfar	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60
33	Mardiono	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
34	Misnawi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
35	Lies farhati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
36	H. Anwar sadad	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	120
37	Reza kassay	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	60
38	Zainal abiding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
39	Ihwanuddin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
40	Izzatun nisa	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70
41	Lutfiatul husna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50
42	H. Khoirul huda	0	90	0	0	0	60	70	0	0	0	0	0	0	0	220
43	Nasihudin	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70
44	Indah ning nur	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	140
45	Mubarok	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	70
46	Holil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
47	Nukman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
48	Nisfi romadhon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
49	Hasib	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
50	Hj. Menik maratus sholiha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50

Sumber: DPC PPP Gresik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwasanya tabel di atas menjelaskan adanya scoring hasil penilaian setiap caleg DPC PPP Gresik 2019 sudah terlihat jelas mana yang akan menepati nomer urut satu sampai seterusnya, Semua di nilai DPC dengan adil. Dan sampai saat ini semua caleg.

c. Penetapan Caleg

Dpc PPP Gresik sudah jauh jauh hari menetapkan caleg caleg yang akan maju di DPRD 2019 terdapat 50 caleg. Diantaranya 21 caleg perempuan dan 29 caleg laki laki. Penetapan caleg yang akan maju ke sesi kampanye antara lain.

Calon Anggota legislatif DPRD Gresik pada Pemilu 2019-2024 dari PPP.

Tabel 4.6.

Daftar Caleg Tetap (DCT) PPP Gresik 2019

Dapil 1 (Gresik- Kebomas)		**Dapil 2 (Cerme- Duduk Sampeyan)**	
1	Hj. Lilik Hidayati	1	Rojikus Syahrir
2	Nur Azizah Febriyanti	2	Mukaukabah Alwadlo
3	Siti Munawaroh, S, Ag.	3	M. Lutfi Syarifudin
4	Mochammad Hasan	4	Choiroh, SH
5	Maksum, S.Pd	5	Abdul Basyid
7	Zainal Abidin		
8	Abdul Wahab, SH		
Dapil 3 (Menganti-Kedamean)		**Dapil 4 (Driorejo- Wringinanom)**	
1	Ali Mahmudi	1	BA. Sumardi
2	Mohammad Yunus	2	Abdul Jalil
3	Dewi Ayumi	3	Vita Nurastuti
4	La Ode Maulidin Aziz	4	Ning Ayu Dyah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5	Lailatul Munawaroh	5	Faisol
6	Siti Mualifah	6	Mohammad Tammam
7	Budi Lestari	7	Vivin Novalia
Dapil 5 (Benjeng- Balonpanggang)		**Dapil 6 (Bawean)**	
1	Mustaqim, S.Pdi	1	Esfar, S.Ag
2	Miftahul Jannah	2	Mardino
3	Sriyono, SP	3	Misname, S.Pdi
4	Nur Jannah	4	Lies Farhatin
5	Winadi		
Dapil 7 (Dukun- Ujung Pangkah- Panceng)		**Dapil 8 (Manyar, Bungah, Sidayu)**	
1	H. Anwar Sadad	1	Khoirul Huda
2	Izzatub Nisa’	2	Supriono
3	Reza Kassy	3	Hj. Menik Maratus Sholihah
4	Lutfiatul Husna	4	H. Muhammad Nuam
5	Mohammad Zenal Abidin	5	Muhammad Kholili
6	Ihwanudin	6	Nisfi Romadhon
		7	Anida Norma
		8	ABD. Hasib
		9	Nasihudin

Sumber : DPC PPP GRESIK

Dari tabel di atas bahwasanya DPC PPP Gresik sudah menetapkan nomer urut caleg dan dapil masing masing yang akan maju di tahap tahap yang akan datang.

4. Pembekalan Caleg

Pembekalan caleg sering di lakukan oleh DPC PPP Gresik sudah tiga kali di agendakan oleh DPC PPP Gresik. Pertama di lakukan di salah satu rumah makan daerah Gresik pembekalan pertama di tujukan untuk semua celeg mengetahui nomer urut dan dapil mereka masing-masing. Pembekalan yang kedua di lakukan di salah satu rumah caleg

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdapil nya di situ semua celeg di beri materi dengan apa yang di alami caleg pada masa kampanye, yang ketiga pembekalan caleg di lakukan di salah satu hotel di Gresik semua caleg di wajibkan hadir di karnakan semua caleg akan di bekali strategi pemenangan dari pemateri DPW PPP Jatim, dari KPU Gresik dan dari Bawaslu Gresik.

Dikesempatan peneliti juga mewawancarai salah satu pengurus DPC Gresik terkait pembekalan caleg yang di berikan kepada setiap para caleg.

> "kita sebagai pengurus DPC sering melakukan pembekalan terhadap semua caleg, meskipun tidak ada jadwal yang di tentukan DPC tapi kita selaku pengurus masih saja melakukan pembekalan tersebut entah di kantor atupun di rumah rumah caleg"[48]

Wawancara di atas bahwasanya DPC PPP Gresik sudah melakukan kewajibanya untuk memberikan pembekalan untuk para caleg PPP Gresik.

Di lain kesempatan peneliti juga melakukan wawancara terhadap salah satu caleg laki laki terkait dengan pembekalan caleg yang di adakan oleh DPC PPP Gresik.

> "iya di sini pengurus DPC PPP Gresik sudah 3 kali melakukan pembekalan caleg, yang pertama di adakan di salah satu rumah makan di Gresik, kedua di lakukan di salah satu rumah caleg dan yang ke tiga di lakukan di salah satu hotel di Gresik. semua caleg di wajibkan datang di karnakan pembekalan tersebuat sangat penting bagi setiap caleg. Narasumber yang sering kita datangkan dari

[48] Wawancara dengan Ali Mahmudi, di kediaman Menganti, Gresik, 10 Desember 2018, jam 17.00 wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> DPW PPP Jatim, kedua dari KPU Gresik dan dari Bawaslu. Pembekalan di lakukan satu hari tujuan di lakukan nya yakni biar semua caleg bisa tau cara berpolitik yang baik dan benar, tau juga strategi yang cocok di gunakan."[49]

Dari wawancara di atas bahwasanya DPC sudah 3 kali melakukan pembekalan baik terhadap caleg perempuan dan laki-laki. Tujuan di adakan nya pembekalan yakni agar semua caleg faham tentang ke PPP an, faham tentang politik yang benar.

5. Forum Konsultasi Caleg

DPC Gresik mempunyai fokur diskusi atau bisa di bilang konsultasi pemenangan untuk setiap para caleg. Siapa saja yang membutuhkan konsultasi DPC dengan siap memberikan solusi kapan pun yang para caleg butuhkan. Peneliti sempat mewawancarai salah satu pengurus DPC untuk menanyakan tentang system kelembagaan konsultasi pemenangan untuk pemilihan legislatif.

> "Siapa saja yang butuh komunikasi silahkan ke DPC, meskipun bukan urusan caleg silahkan saja datang ke DPC, DPC selalu menerima konsultasi caleg maupun tidak caleg".[50]

Singkatnya wawancara di atas menjelaskan bahwasanya DPC sangat siap untuk membantu para caleg yang memang membutuhkan bantuan untuk bisa melancarkan pencalegan di tahun 2019.

Peneliti juga mewawancarai salah satu caleg perempuan terkait forum konsultasi yang di berikan DPC ke setiap caleg.

---

[49] Ibid.

[50] Wawancara dengan bapak H. Murtadlo Nur, di kediaman cerme, Gresik, 27 November 2018, jam 09.00 wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "saya pernah dengar kalo DPC memberikan konsultasi ke caleg terkait masalah yang di hadapi caleg. Tetapi saya sendiri biasanya konsultasi dengan caleg di dapil saya sendiri. Dapil saya juga sering mengadakan diskusi terkait pemenangan."[51]

Wawancara di atas sedikit menjelasakan terkait forum konsultasi yang di berikan DPC. Tetapi caleg perempuan tersebut hanya diskusi dengan caleg sesama dapil nya alasanya menurut caleg tersebut yakni konsultasi bisa sama siapa saja asal bisa memecahkan solusi dengan baik.

6. Bantuan Alat Peraga Kampanye

Setiap caleg semua di beri alat peraga kampanye mulai dari stiker dan bendera PPP. Ada salah satu wawancara terhadap caleg mengenai bantuan alat peraga kampanye yang di berkan DPC Gesik terhadap setiap caleg.

> "sejauh ini saya sebagai caleg memang di kasih bantuan alat peraga kampanye seperti stiker dan bendera PPP hanya itu saja selebihnya itu kita membuat sendiri seperti banner dan alat peraga lainya."[52]

Wawancara di atas bahwasanya partai hanya mendiakan dua alat peraga saja yang lainya di serahkan pada personal caleg. Dalam sejauh ini DPC PPP Gresik memberikan sedikit APK kepada setiap para caleg perempuan maupun laki-laki. Peneliti mewawancarai salah satu caleg perempuan terkait APK yang di berikan oleh DPC PPP Gresik.

---

[51] Wawancara dengan Miftahul Jannah, di kediaman Balongpanggang, Gresik, 29 November 2018, jam 09.00 wib.
[52] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "saya menerima APK seperti stiker dan bendera dari DPC PPP Gresik. jumlah stiker yang saya terimah sekitar 1.000 dan bendera PPP sekitar 40 an bendera. Tapi benderanya di pasang di setiap dapil bukan setiap caleg. Jadi kita membuat kordinasi dengan dapil saya terkait tampat yang paling evektif untuk di pasang bendera PPP tapi saya sendiri membawa bendera sebanyak 10 untuk di pasang di daerah saya."[53]

Caleg di atas menjelaskan bahwasanya memang semua caleg di berikan DPC stiker dan bandera. Stiker yang di terima para caleg cukup banyak yakni sebanyak 1.000 stiker dan bendera sebanyak 40 setiap dapil nya. Bantuan tersebut menurut caleg cukup membantu untuk memperbanyak alat perga kampanye yang di miliki caleg tersebut.

7. Penyediaan Saksi per TPS

DPC Gresik atau pengurus DPC Gresik menyediakan saksi per TPS untuk para caleg PPP Gresik. Menurut anggota pengurus DPC Gresik penyediaan saksi meringankan beban seluruh caleg agar seluruh caleg focus terhadap mencari masa.

Wawancara di bawah ini bersama salah satu caleg mengenai saksi yang di sediakan DPC.

> "iya kemarin waktu pembekalan di sampaikan sama pengurus DPC jikalau semua saksi akan di sediakan oleh DPC dan menurut saya itu sangat baik di karnakan DPC hanya memberikan alat peraga

[53] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa stiker dan bendera saja tidak ada dana kampanye yang di berikan DPC. Adanya penyediaan saksi ini sangat membantu"[54]

Wawancara di atas menunjukan bahwasanya semua caleg sudah di sediakan saksi per TPS untuk setiap caleg agar semua caleg bisa fokus terhadap masa pendekatan terhadap masyarakat pemilih.

Di lain kesempatan peneliti mewawancarai salah satu caleg menanyakan terkait penyediaan saksi per TPS nya.

"disini saya sudah menyediakan sendiri saksi khusus di desa saya ada 16 saksi. Tetapi caleg juga di sediain dari ranting untuk saksi per TPS nya tapi saya juga mencoba mencari sendiri, tidak ada kriteria khusus untuk saksi yang saya cari hanya kesetiaan saja dan pembekalan juga tidak ada saya mencari saksi yang cukup berpengalaman dalam politik itu sudah cukup menurut saya."[55]

Dari wawancara di atas bahwasanya setiap caleg sudah di sediakan saksi oleh ranting masing masing biaya untuk saksi juga sudah di buatkan anggaran dari DPC hanya saja tugas ranting mencarai saksi yang benar benar jujur dan mempunyai pengalaman menjadi saksi.

KPU Gresik sudah mengumumkan prihal jumlah keseluruhan TPS di Gresik seperti Kecamatan Balongpanggang ada 118, Kecamatan Benjeng ada 126, Kecamatan Bungah ada 115, Kecamatan Cerme ada 132, Kecamatan Driorejo ada 167, Kecamatan Duduk Sampeyan ada 90, Kecamatan Dukun ada 132, Kecamatan Gresik ada 128, Kecamatan Kebomas ada 151, Kecamatan Kedamean ada 111,

[54] Wawancara dengan Hj. Menik Maratus Sholiha, di kediaman Suci, Manyar, Gresik, 10 Desember 2018, jam 09.00 wib.

[55] Wawancara dengan Miftahul Jannah, di kediaman Balong Panggang, Gresik, 29 November 2018, jam 09.00 wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Manyar ada 163, Kecamatan Menganti ada 192, Kecamatan Panceng ada 106, Kecamatan Sangkapura ada 116, Kecamatan Sidayu ada 69, Kecamatan Tambak ada 68, Kecamatan Ujungpangkah ada 101, Kecamatan Wringinanom ada 125. Jumlah keseluruhan TPS di Gresik ada 2.210 jadi DPC PPP Gresik menyediakan saksi sesuai jumlah TPS yang ada.

8. Evaluasi Progres Report Caleg

Progress Report caleg atau laporan perkembangan setiap caleg setiap harinya pasti ada peningkatan mulai dari pendekatan personal antar masyarakat sekitar sampai menyiapakan alat peraga kampanye.

Peneliti melakukan wawancara terhadap salah satu caleg mengenai Progres Report Caleg yang di lakukan selama masa kampanye.

> "saya sekarang sudah menjadi DPRD dan mencalonkan lagi yang saya lakukan sekarang saya sudah membuat tim sukses dari semua daerah. Timsukses saya setiap harinya berkerja membantu mencarikan massa jadi setiap harinya juga pasti ada perkembangan dari daerah yang mempunyai hak memilih saya"[56]

Jadi Ibu Lilik Hidayati setiap harinya terdapat perkembangan yang di lakukan tim sukses untuk mencari masyarakat yang mempunyai hak pilih.

[56] Wawancara dengan Lilik Hidayati, di kantor DPRD Gresik, Gresik, 13 Desember 2018, jam 09.00 wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Evaluasi progress Report sendiri juga pastinya di lakukan semua caleg antara lain kebanyakan yang di lakukan caleg yakni menyapa masyarakat langsung, mempersuasi tokoh yang berpengaruh dan pamasangan APK di kesempatan waktu peneliti mewawancarai salah satu caleg yang merupakan dapil 8 (Manyar, Bungah, Sidayu).

> "Yang pertama UU pemilu melarang barkampanye di lembaga pendidikan sehingga kita tidak boleh masuk ke lembaga tersebut dan maupun tempat ibada jadi kita tetap meskipun pesantren besar ya kita sosialisasi lewat door to door atau sowan kepada pengasuhnya tidak melalui kegiatan kampanye langsung di pesantresn, dan untuk pembuat APK saya sudah membuat banyak antara lain banner, stiker, kaos. Jadi saya tingal menyapa masyarakat secara intens dan membuat pertemuan dengan semua timsukes saya.[57]

Wawancara di atas sedikit menjelasakan bahwasanya Progres Report yang di lakukan sesering mungkin menyapa masyarakat yang mempunyai hal pilih untuk memilih caleg tersebut. Tak hanya itu pun yang di lakukan caleg mereka juga mempersuasi masyarakat yang berpengaruh di masyarakat untuk menjulang suara banyak.

Caleg tersebut juga membuat banyak APK untuk di pasangkan di setiap titik daerah dengan itu masyarakat sudah bisa menilai bahwasanya caleg tersebut serius untuk mencalonkan diri.

[57] Wawancara dengan Khoirul Huda, di kediaman Suci, Manyar, Gresik, 12 Desember 2018, jam 17.00 wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Faktor- faktor Pengambat Rekrutmen Caleg Perempuan

1. Faktor Internal

Keterwakilan perempuan yang minim pada lembaga-lembaga pengambilan kebijakan di Indonesia tentunya menjadi persoalan, terutama ketika transisi menuju demokrasi menuntut keadilan dan kesetaraan pada perempuan. Faktor penghalang aktualisasi perempuan salah satunya adalah kondisi sosiokultur berupa budaya patriarki. Dalam budaya patriarki ini digambarkan dominasi laki-laki yang tinggi, yang tidak memberikan kesempatan pada perempuan. Dalam budaya ini ada anggapan bahwa perempuan itu lemah dan memposisikan perempuan sebagai ibu rumah tangga.

Dari masa ke masa, kebijakan afirmatif terhadap perempuan dalam bidang politik terus disempurnakan. Hal tersebut bisa dilihat pada saat DPR merumuskan RUU Paket Politik yang digunakan dalam Pemilu Tahun 2009, yaitu Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Selanjtnya, kebijakan afirmatif yang paling baru dan telah disahkan oleh pemerintah adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, di mana pada Pasal 55 dalam undang-undang tersebut dengan gambling menjelaskan bahwa paling sedikit terdapat 30%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterwakilan perempuan bagi setiap partai peserta pemilu. Dan yang paling baru adalah Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 173 dijelaskan bahwa, *pertama*, partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi KPU, dan, *kedua*, yang kedua partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan contohnya memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, bersetatus badan hukum sesuai dengan undang-undang tentang partai politik dan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik pusat dan yang ketiga partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana di maksud pada ayat 2 tidak di verifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu.[58]

Adapun di setiap caleg perempuan maupun laki laki pasti mepunyai pengambat dalam proses rekrutmen baik di DPC maupun di individu caleg. Tetapi pengambat tersebut membuat semua caleg semangat untuk bisa meraih suara banyak dan menyakinkan semua pemilih.

Jadi di DPC PPP sendiri sangat berkerja keras untuk mencari caleg perempuan di karnakan caleg perempuan sangatlah lah sulit dan kurang minat untuk mencalonkan diri nya ke pemilihan legislatif.

Dikarnakan kebanyakan perempuan hanya minim pengetahuan tentang berpolitik. Tetapi DPC siap memberikan pembekalan atau

[58] http://www.hukumonline.com/pusatdata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kajian tentang kepolitikan di karnakan itu sangat penting untuk terjun ke masyarakat.

Ditambah minimnya ketrampilan politik termasuk pengambat buat caleg perempuan semua perempuan sering mengangap remeh soal politik apalagi di tahun tahun ini banyak para legislatif korupsi kejadian seperti itu membuat para kaum perempuan kurang minat untuk mencalonkan dirinya menjadi legislatif.

Di jaman modern seperti ini jejaring social sangat lah penting tetapi tidak banyak juga orang bisa mengunakan media social. Pengambat para celeg perempuan apalagi yang lumayan tua kebanyakan hanya minim mengetahui social media sehingga menjadi pengambat juga buat popularitas caleg perempuan untuk mencalonkan diri di legislatif.

Yang tak kalah penting yakni keterbatasan waktu di masa kampanye pasti semua caleg perempuan mempunyai kewajiban mengurus rumah tanggah. Keterbatasan waktu tersebut juga banyak di keluhkan semua caleg perempuan sehingga sangat minim kemenangan di caleg perempuan. Banyak waktu yang perlu di bagi antara keluarga, kerja dan kampanye.

Pendek kata faktor pengambat dari segi faktor internal yang di alami caleg antara lain: kurangnya minat para caleg perempuan untuk mencalonkan diri menjadi caleg legislatif, minimnya pengetahuan politik atau keterampilan politik, minimnya jaringan social yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka miliki sehinga menjadi pengambat popularitas, keterbatasan waktu kampanye yang sangat singkat, peneliti mewawancarai salah satu caleg terkait pengambat rekrutmen politik.

> "saya terkendala dengan waktu, karna saya kalo nyari suara door to door itu pasti sama suami sedangkan suami kalo siang kerja bisa nya cuma malem dan itupun malem biasanya saya maksimal dua orang yang bisa saya datangi seperti itu".[59]

Wawancara di atas bahwasanya caleg dengan nomer urut dua Ibu Miftahul Jannah kendalanya yakni kurangnya waktu door to door kepada para masyarakat pengambatnya di karenakan suami dari Ibu Miftahul Jannah tidak mamperbolehkan untuk door to door di saat malam hari tanpa di temani suami.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yakni yang timbul dari luar dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap adanya proses rekrutmen caleg legislatif Partai Persatuan Pembangunan. Modal social yang di miliki calon legislatif akan mengangkat dan menjembatani perempuan membangun dan memperluas jaringan hingga akhir lolos menjadi anggota legislatif. Adapun modal tersebut merupakan sumber daya yang dimiliki seseorang dalam pemberdayaan masyarakat, baik berupa modal material maupun modal non material. Modal material berkaitan

[59] Wawancara dengan Miftahul Jannah, di kediaman Balongpanggang, Gresik, 29 November 2018, jam 09.00 wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan asset asset finansial sedangkan modal non material berkaitan dengan kepercayaan dan system kebersamaan dalam suatu masyarakat.

Banyak terjadinya politik kekerabatan di Indonesia sekarang jadi sistem kekeluargaan itu di manfaatkan untuk mencalonkan diri menjadi calon legislatif. Entah kemampuan nya bagus atau hanya ingin mendaptakan bayaran yang besar.

Masyarakat yang mempunyai kemampuan malah tidak di anggap atau tidak malah di calegan menjadi calon legislatif. Di karnakan hanya orang tertentu atau orang terdekat dari pengurus atau ketua salah satu partai.

Minimnya dana juga sering di alami semua celeg. Jadi caleg kurang bersemangat untuk bisa menang di karnakan dana tidak ada hanya perlengkapan kampanye seperti stiker dan bendera saja yang di berikan oleh DPC.

Sering di keluhkan salah satu caleg yang minim pengetahuan tentang jejaring social mereka merasa kalah akan popularitas di dunia maya karna kampanye di dunia maya lebih simple dan sangat mendalam.

Dana kampanye sering di keluhkan semua caleg apalagi jikalau caleg pesaing mempunyai banyak dana yang di miliki. Pastinya celeg

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan berusaha untuk bisa unggu dengan caleg yang mempunyai dana lebih banyak.

Gesekan antar dapil sering di alami semua caleg, seperti adanya banner yang di sobek atau adanya banner yang di hadapkan ke arah yang tidak sesuai. Kebanyakan caleg pernah merasakan hal tersebut, maka caleg tetap semangat untuk bisa menang.

Setiap caleg pastinya memiliki strategi yang berbeda beda entah dari satu dapil atau beda partai. semua caleg di sibukan dengan strategi masing masing sering di temukan strategi caleg pesaing lebih baik entah dari performen nya di masyarakat atau pendanaan. Dari situ banyak caleg yang sadar bahwa strategi nya kurang bagus untuk bisa mempengaruhi masyarakat.

Yang terakir masyarakat kurang percaya dengan adanya pemimpin perempuan sering meremehkan hasil kinerja seorang perempuan dari pandangan masyarakat seperti itu caleg perempuan lebih bersemangat untuk bisa memenangkan pemilihan legislatif tersebut membuktikan jikalau pemimpin perempuan juga mempunyai kemampuan yang sama dengan caleg laki- laki.

Ada beberapa faktor pengambat dari segi faktor eksternal yaitu: Terjadinya politik kekerabatan yang menguntungkan system kekeluargaan untuk calon legislatif, sumbangan dana dari partai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurang maksimal atau kurang terbatas, caleg pesaing memiliki jejaringan social politik lebih luas dan lebih mendalam, caleg pesaing memiliki dana kampanye lebih besar, gesekan antar caleg sesame dapil, caleg pesaing lebih memiliki jejaringan social lebih luas, caleg pesaing lebih memiliki strategi kampanye lebih baik, pandangan masyarakat terhadap caleg perempuan masih kurang baik atau masih meremehkan adanya pemimpin perempuan.

Peneliti juga mewawancarai salah satu caleg mengenai faktor pengambat segi eksternal.

> "Ya biasnya ada tapi kita harus hati hati. Kita harus pandai berteman gesekan itu dari awal sudah ada tapi kita wajar saja namanya juga perebutan, dinamika pemilu itu meskipun di pemilu tingkat presiden itu mesti ada gesekan dan biasanya siperan itu tidak ada masalah tapi yang namnya timsukes itu lo yang kurang memahami bahwa politik itu tidak seperti itu."[60]

Dari wawancara di atas bahwasanya gesekan antar caleg itu ada meskipun sesama partai PPP tetapi caleg harus pantai pantai menyikapi nya kalo tidak yang di rugikan yakni partai PPP.

[60] Wawancara dengan Lilik Hidayati, di kantor DPRD Gresik, Gresik, 13 Desember 2018, jam 09.00 wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian dengan judul Strategi Rekrutmen Caleg Perempuan pada Pemilu 2019 Studi Kasus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Gresik.

1. Rekrutmen yang dilakukan partai politik sendiri yakni, strategi rekrutmen caleg yang dilakukan PPP Gresik adalah membentuk Lajnah Pemenangan Pemilu (LP2), sosialisasi pendaftaran caleg, penentuan nomor urut dan dapil caleg pembekalan caleg, forum konsultasi pemenangan caleg, bantuan alat peraga kampanye, penyediaan saksi per TPS, evaluasi progress report caleg. Partai politik akan melakukan rekrutmen sebaik baiknya dan seketat mungkin sehingga bakal caleg yang lolos benar – benar terbaik. Selain itu terdapat mekanisme khusus untuk mendaftar ke DPC yang paling penting yakni setiap caleg yang mau mendaftar harus beragama islam, bisa memperjuangkan visi misi ke masyarakat.
2. Salah satu pengambat Strategi Rekrutmen Caleg Perempuan yakni minimnya minat perempuan untuk mencalonkan diri, minimnya pengetahuan dan keterampilan berpolitik, kurangnya dana kampanye, minimnya jaringan social dan keterbatasan waktu kampanye dan hambatan eksternal antara lain Pandangan masyarakat terhadap caleg perempuan masih kurang baik atau masih meremehkan adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemimpin perempuan, Caleg pesaing lebih memiliki jejaringan social lebih luas, dan Caleg pesaing memiliki dana kampanye lebih besar. Dari permasalahan itu partai PPP merekrut semua anggota caleg yang harus benar benar mampu dan bisa menjadi apa yang di harapkan oleh masyarakat sekarang.

Selanjutnya yakni adalah dengan membangun citra politik yang baik (uswah hasanah), dengan cara ini PPP diharapkan dapat menciptakan citra positif di masyarakat, disegani dan dihormati oleh semua kalangan khususnya di kabupeten Gresik.

B. SARAN

Melihat apa yang di lakukan DPC PPP Gresik yakni strategi rekrutmen caleg perempuan di DPC PPP Gresik kurang maksimal. Entah dari strategi partai sampai strategi di setiap para celeg. Dari strategi setiap caleg khususnya celeg baru kurang nya pendekatan kepada masyarakat tapi di balik itu para caleg juga mempunyai alasan karna kurang nya dana kampanye yang di miliki. Setidaknya DPC PPP Gresik juga memberikan sedikit sumbangan buat para caleg untuk lebih semangat terjun ke masyarakat.

Tugas partai sekarang banyak nya sosialisasi terhadap masyarakat khususnya para celeg caleg yang akan berlaga merebutkan kursi di parlemen. Dan terakhir Hal yang mungkin bisa dilakukan adalah melanjutkan trend PPP yang semakin fresh dan di isi oleh generasi milenial, hal ini tidak lebih untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengimbangi perkembangan generasi yang semakin digital dan modern untuk dapat bersaing mendapat hati dan kepercayaan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amal, Ichlasul *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta 2014)

Budiarjo Mirriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Cangara Hafied. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, Dan Strategi.* Jakarta: 25 Januari 2011 Rajawali Pers.

Crotty William and Katz Richard *Handbook Of Party Politice* (London: Sagen Publications 2015).

Firmanzah, Marketing Politik, Antara Pemahaman dan Realitas. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2012.

Form pengurus LP2 DPC PPP Kabupaten Gresik.

Herbert Mcclosky, *Political Participation*, Dan Miriam Budiarjo, *Partisipasi Dan Partai Politik* Jakarta.

Hesel Nogi Tangkilisan,2003, *Kebijakan Publik Yang Membumi, eew11Yogyakarta* (Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia 2003).

Huntion P Samuel, *Gelombang Demokrasi Ketiga,* (Jakarta: Grafitri, 1997).

Kasali *Manajemen Pemasaran Analisis, Perencanaan Implementasi Dan Pengendalian,* (Erlangga, Jakarta, 2013).

Ketetapan muktamar VI PPP Tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga , Jakarta 2007.

Kotler, Philip *Manajemen Pemasaran Analisis, Perencanaan Implementasi Dan Pengendalian, (*Erlangga, Jakarta, 2000).

M.Alfian Alfian, *Menjadi Pemimpin Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Schroeder Peter, *Strategi Politik* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2009).

Sofyan Assauri, *Manajemen Pemasaran, Dasar, Konsep Dan Strategi,* (Rajawali Press, Jakarta, 2001).

Surat Keputusan PPP *"Susunan dan Personalia Pengurus Harian DPC PPP Kab Gresik masa bakti 2016-2021".*

Suratno Bondan dan Rismianti, *Pemasaran Barang Dan Jasa, Kanisius,* (Yogyakarta, 2001).

Surbakti Ramlan *memahami ilmu politik* (Jakarta: PT. Gramedia Widisuasarana, 1992).

Teguh Ilham /Dr. Labodo Muhadam , S.Stp *Partai Politik Dan System Pemilihan Umum Di Indonesia*. (Jakarta:PT Gremedia Pustaka Utama 2013).

Tim Litbang Kompas, partai partai politik Indonesia, (Jakarta PT. Kompas media Nusantara, 1999)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

JURNAL

Auliyah Hikmatul, *"Sikap Politik Partai Persatuan Pembangunan Dalam Sukseskan Kepemimpinan Negara Pada Pemilu 2014"* (skripsi, Fisip Undip 2014).

Dokumen DPC PPP Gesik, penetapan caleg 2019-2024.

Dominic Wring, *Reconciling Marketing With Political Science: Theories Of Political Marketing*, (Journal Of Marketing Management, 1997, Vol 13).

Drs. S Amsir, M.Si Dengan *"Implemtasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Rekrutmen Calon Legislatif Oleh Partai Politik Di Kota Padang"* (jurnal Fisip UNP) hlm 14-15 vol 16 no 2 thn 2014.

Hadi Atmaja Reza M "*Analisa Proses Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014 Di Kota Semarang (Studi Kasus Partai Persatuan Pembangunan)"* (jurnal,Fisip Undip 2014) Hlm 24-29 Website : Http://Www.Fisip.Undip.Ac.Id Email : Fisip@Undip.Ac.Id.

Hendrawati *"Rekrutmen Perempuan Menjadi Politisi (Legislatif)"* (jurmal penelitian pers dan komunikasi pembangunan) banjarmasin hlm 131 vol 18 no 2 thn 2014.

Lampiran surat NO: 8/7272 / LHK.00.02./10-12/09/2018.

Rofieq Ainur *Fungsi Rekruitmen Politik Pada Calon Legislatif Partai Persatuan Pembangunan (PPP)*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 2, (2011).

Rosieana Mari *Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Kabupaten Gresik Studi Pada Anggota DPRD Kabupaten Gresik.* Ejurnal Pemerintah Integratif Vol. 1 No. 1, thn 2013.

Reconciling, Wring, Dominic Marketing With Political Science: Theories Of Political Marketing, (Journal Of Marketing Management, 1997, Vol 13).

Silvana Nuri Dengan Judul "*Keterwakilan Perempuan Dalam Kepengurusan Partai Politik Dan Pencalonan Legislatif"* (skripsi Fisip Unsoed purwokerto2013).

Sirine Hani Jurnal Segmenting, Targeting, And Positioning Strategy, Price Strategy, Vol. 01, No. 03, September 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

WAWANCARA

Wawancara dengan Mahmudi Ali, di kediaman Menganti, Gresik, 10 Desember 2018, jam 17.00 wib.

Wawancara dengan Nur Murtadlo H, di kediaman cerme, Gresik, 27 November 2018, jam 09.00 wib.

Wawancara Dengan Hidayati Lilik, di kantor DPRD Gresik, 13 Desember 2018, jam 09.00 wib.

Wawancara dengan Sholiha Maratus Menik Hj, di kediaman Suci, Manyar, Gresik, 10 Desember 2018, jam 09.00 wib.

Wawancara dengan Jannah Mifathul, di kediaman Balongpanggang, Gresik, 29 November 2018, jam 09.00 wib.

Wawancara dengan Sekretaris DPC PPP Gresik Huda Khoirul, di kediaman Suci, Manyar, Gresik, 12 Desember 2018, jam 17.00 wib.

INTERNET

Arsip PPP kab gresik.

Badan Pusat Statistik kab Gresik.

Berita Gresik.com- jumlah anggota DPRD 2014-2019 partai PPP PKB dan PKS.

http://www.hukumonline.com/pusatdata.

Jumlah muslim di Gresik 1.147, 746, jumlah madrasah di Gresik 237, Badan Pusat Stastistika Kabupaten Gresik.

LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2016.

Peolehan Suara Pemilu 2014 Gresik.

www.hukumonline.com/pusatdata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id